



LAPORAN

Diseminasi Hasil Kegiatan CoLUPSIA

(Collaborative Land Use Planning and Sustainable Institutional Arrangement Project)

Dengan SKPD di Masohi



Masohi, 6 Mei 2013

NOTULENSI

DISEMINASI HASIL KEGIATAN CoLUPSIA DAN DISKUSI PENGGUNAAN HASIL KEGIATAN DALAM PENATAGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan disuatu daerah seringkali diikuti oleh perubahan penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan. Untuk mengakomodir perubahan penggunaan lahan, diperlukan adanya perencanaan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik dan fungsi kawasan. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan supaya dampak negatif dari pembangunan terhadap lingkungan dan masyarakat dapat dihindari. Oleh karenanya, perencanaan yang baik di suatu daerah hendaknya tidak hanya melibatkan unsur pemerintah saja, akan tetapi juga melibatkan sektor swasta, masyarakat lokal, perguruan tinggi atau lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, kelompok perempuan maupun masyarakat sipil dengan memperhitungkan berbagai aspek baik biofisik, ekonomi, social-budaya termasuk hak tradisional masyarakat. Proyek tata guna lahan kolaboratif (Collaborative Land Use Planning - CoLUPSIA) merupakan kerjasama antara CIRAD France (Agriculture Research and Development), CIFOR (Center for International Forestry Research), TELAPAK, HuMa dan Riak Bumi yang didukung oleh Uni Eropa.

Tujuan Proyek CoLUPSIA yakni untuk menghindari deforestasi dan kerusakan lingkungan di dua lokasi kerjanya yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Maluku Tengah, beberapa kegiatan yang dilakukan Proyek CoLUPSIA selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2012 terkait dengan isu penggunaan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu meliputi kegiatan Analisis Prospektif Partisipatif (*Participatory Prospective Analysis*) dalam membangun kesepakatan bersama tentang rencana penggunaan lahan dimasa depan, survei vegetasi/tipe hutan, survei tanah dan erosi serta survei sosial ekonomi. Pelatihan terkait dengan GIS juga diberikan kepada staff dari beberapa instansi yang terkait dengan isu penggunaan lahan. Selain itu, kegiatan pemetaan juga dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang tutupan lahan terkini dan status kawasan di Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2. Tujuan

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memaparkan hasil kajian dan kegiatan yang telah dicapai Proyek CoLUPSIA kepada instansi terkait dan mendiskusikan peluang mensinergikan dan tindak lanjut berkaitan dengan penatagunaan lahan di tingkat Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3. Hasil Yang Diharapkan

Pertemuan ini diharapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- Parapihak memahami hasil kegiatan proyek CoLUPSIA yang sedang berjalan di Kabupaten Kapuas Hulu.
- Para pihak dapat mendiskusikan tentang relevansi dan penggunaan hasil kajian CoLUPSIA dalam revisi tata ruang di Kabupaten Kapuas Hulu

2. PROSES WORKSHOP

Kegiatan workshop dimulai dengan penjelasan singkat oleh MC (Alfa Ratu Simarankir) tentang tujuan dilaksanakannya workshop, agenda workshop (lampiran 1), juga partisipan yang terlibat dalam workshop (lampiran 2). Workshop yang dilaksanakan di Aula Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 17 September 2013 dihadiri oleh seluruh SKPD Kabupaten Kapuas Hulu.

2.1. Kata Sambutan

Acara dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan yang dibawakan oleh Program Team Leader Proyek CoLUPSIA, Kata sambutan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan Penyampaian kata sambutan dari Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu dibarengi dengan pembukaan workshop secara resmi.

2.1.1. Sambutan dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu

Sambutan dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu disampaikan oleh Drs. H. Hasan M.Si

Assalamualaikum Wr.Wb, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Kapuas Hulu yang dalam hal ini di wakili oleh Bapak Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu, yang terhormat pimpinan CoLUPSIA beserta anggota, dan sekaligus saya ucapkan selamat datang di Bumi Uncak Kapuas dan yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu peserta workshop.

Allhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadiran allah subbehanarllahitaangala yang mana pada pagi hari ini kita masih di berikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di Aula Bappeda ini dalam rangka untuk mendengarkan penyampaian hasil kegiatan program dari CoLUPSIA, yang mana telah di laksanakan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, pada kesempatan yang berbahagia ini, perlu saya sampaikan bahwa pertemuan kita pada pagi hari ini, tak lain adalah di samping akan di adakannya proyek tata guna lahan colaboratif (CoLUPSIA) dalam rangka untuk member

sumbang saran terhadap rencana pembangunan di daerah kita, terutama dalam hal perubahan penggunaan lahan oleh berbagai kepentingan.

Tidak jarang perubahan penggunaan lahan sering kali kurang memperhatikan berbagai aspek seperti Biofisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, termasuk hak-hak Tradisional masyarakat sehingga tak jarang mengakibatkan konflik, di samping itu tak kalah pentingnya akibat perubahan penggunaan lahan serta pemanfaatan kawasan atau akan mendorong lajunya deforestasi dan kerusakan lingkungan, dalam kesempatan berbahagia ini kami mengucapkan terimakasih kepada bapak pimpinan atau proyek tata guna lahan kolaboratif atau CoLUPSIA yang telah mengambil inisiatif untuk membantu pemerintah daerah dalam hal untuk menata atau mungkin ada hal-hal berkenaan langsung tata batas di Kabupaten Kapuas Hulu.

Terusterang Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi, kalau di lihat dari udara masih hijau namun di dalamnya 51,56% atau lebih kurang 52% semuanya dikelola oleh Departemen Kehutanan, termasuk Hutan Produksi, Kawasan Hutan Lindung, termasuk di situ ada kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dengan luas 807,000 Ha, Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) dengan luas 132,000 Hektar, itu semuanya dibawah komando langsung oleh Departemen Kehutanan pusat, untuk itu mungkin dalam hal ini permasalahan di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten konservasi, kenapa munculnya kebun ini yang sering menjadi pertanyaan terutama dari pihak - pihak NGO.

Jadi Kabupaten Konservasi bukan berarti tidak boleh menebang, bukan berarti kami sebagai kabupaten konservasi kami hanya melihat, rakyat kami mau makan apa ?, apa yang diberikan pusat kepada kami?, apa yang diberi dunia kepada kami sebagai kabupaten konservasi?, kami menebang, kami punya aturan yang kami tetapkan dan kami jalankan, yang kami tebang di kawasan yang kami punya Areal Penggunaan Lain (APL) hanya 18 % untuk keseimbangan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan, itu pun baru di garap 12% yang lain masih dalam Proses, mungkin disini yang masih terjadi tumpang tindih dari Hutan Produksi, Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan lain sebagainya.

Tetapi dengan adanya proyek CoLUPSIA ini saya berharap dapat membantu terutama dalam menata kembali, karena terusterang, didalam Department Kehutanan tidak sinkron diantara mereka, antara Dirjen Planologi dan Dirjen PHKA itu tidak akan sinkron, apa lagi dengan di daerah, jadi kalau mau mensinkronkan, di sinkronkan dulu di pusat, bicaralah kebawahnya a, jangan sampai dibawah a,b,c,d, nah ini yang kami sebagai barisan depan yang merasa berduka, selalu berhadapan dengan segala persoalan khususnya di Kabupaten sementara yang di pusat hanya onggang-onggang kaki, bicara kebijakan di pusat itu terus terang saja hari ini keluar peraturan terutama di sektor Kehutanan, baru

keluar Peraturan Pemerintah, baru mau di tindak lanjuti sudah hilang lagi, sudah tidak dimanfaatkan lagi ini yang sering terjadi terutama di Departemen Kehutanan.

Mohon maaf pak kalau kami bicara agak panas, kami terusterang kami di bawah Pemerintah Daerah, di bawah Otonomi Daerah, atasan langsung kami adalah Bapak Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, tapi inilah yang kami rasakan yang ada di lapangan, namun untuk itu dengan adanya kegiatan ini saya mengharapkan lebih dukungan dari seluruh SKPD terkait, baik yang berkenaan dari sektor Pertambangan dan lain sebagainya, mari kita duduk bersama kita bantu program ini (CoLUPSIA), hingga semuanya bisa di berikan dan untuk masa depan yang lebih baik, yang menjadi permasalahan saat ini tata rung sejak dari tahun 2010 oleh Bapak Gubernur hingga saat ini masih belum ada titik terang, jadi sekarang kalau kita bicara batas-batas antar desa, batas kawasan hutan, ini juga semoga kedepan masalah ini cepat selesai, sehingga walaupun nanti masuk dari CoLUPSIA sudah bisa searah dan seiring sejalan ini harapan kami.

Dalam hal untuk menghindari Deforestasi dan kerusakan lingkungan maka proyek CoLUPSIA yang merupakan kerjasama antara CIRAD France (Agriculture Research and Development), CIFOR (Center for International Forestry Research), Telapak, HuMa dan Riak Bumi yang didukung oleh Uni Eropa dilaksanakan di dua lokasi kerjanya yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat dan Kabupaten Maluku Tengah, dua kegiatan ini yang berada di Indonesia ya Pak ?, beberapa kegiatan yang dilakukan Proyek CoLUPSIA selama kurun waktu 2010 sampai 2012 terkait dengan isu penggunaan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu meliputi kegiatan Analisis Prospektif Partisipatif (*Participatory Prospective Analysis/PPA*) dalam membangun kesepakatan bersama tentang rencana penggunaan lahan di masa depan, survei vegetasi/tipe hutan, survei tanah dan erosi serta survei social-ekonomi, Pelatihan terkait dengan GIS juga diberikan kepada staff dari beberapa instansi yang terkait dengan isu penggunaan lahan selain itu, kegiatan pemetaan juga dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang tutupan lahan terkini dan status kawasan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah di lakukan di Kabupaten Kapuas Hulu menggambarkan kondisi terkini, serta potensi khusus di lokasi yang menjadi site proyek CoLUPSIA, juga terdapat kesesuaian antara hasil program CoLUPSIA dengan Program Pemerintah Kabupaten terutama dalam hal penataan ruang, semoga saja apa yang telah di hasilkan dari proyek CoLUPSIA di Kabupaten Kapuas Hulu dapat di jadikan bahan pertimbangan dalam membuat rekomendasi ke pada pemerintah pusat terutama dalam merevisi peraturan atau pola tata ruang yang berlaku saat ini yang kurang mengakomodir kebutuhan para pihak di banyak daerah, terutama di Kabupaten Kapuas Hulu.

Semoga kita dapat mengikuti acara ini dengan baik dengan masukan dan saran yang nanti akan berguna bagi kita semua, bagi Daerah, Negara kita, serta

bagi segenap anak cucu kita, akhirnya terimakasih atas perhatian mohon maaf atas segala khilaf atas segala kesalahan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung didunia dan diakhirat, amin-amin yarobbal alamin dan sebelum kami akhiri dalam kesempatan berbahagia ini juga kami menghimbau dan mengajak para NGO - NGO yang datang dari luar Kapuas Hulu maupun yang datang, baik dari Uni Eropa atau dari Negara lain, kalau mau mengajak bekerja sama dengan Pemerintah Kapuas Hulu, saya member masukan kepada teman-teman NGO agar jangan langsung ke Dinas Perkebunan dan Kehutanan, saya mempunyai pemikiran bahwa Bappeda Kapuas Hulu adalah wajah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, jadi silahkan berkoordinasi dulu dan minta masukan dari Bappeda Kapuas Hulu, setelah itu baru ke instansi teknis setelah mendapat arahan dari Bappeda ini masukan dari kami dan kami terusterang kalau membicara NGO ini agak tidak enak hampir semuanya ketemu di Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

Jadi kami menyarankan kalau dapat kedepanya kami berharap teman-teman NGO yang datang ke Kapuas Hulu berkoordinasilah dulu denga Bappeda, karena Bappeda adalah corongnya pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, karena di Bappeda ini lebih tau setelah itu baru masuk instansi-intansi teknis ini masukan dari kami, dan harapan ini juga saya menghayalkan kalau baiknya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu lebih jeli, kalau bisa masing-masing instansi mempunyai ruangan khusus untuk menyiapkan Data Base di Bappeda ini, jadi siapa pun yang datang tinggal buka saja.

Dalam kesempatan ini kami ada mengirim staff teknis untuk mengikuti acara ini, karena kami tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai, karena ada kegiatan lain, hari ini ada 4 kegiatan yang harus kami hadiri, tetapi yang tak kalah lebih penting bapak BPN apakah hadir di Aula Rapat Bupati karena ada masalah pembebasan tanah yang untuk perluasan bandara, saya kira cukup sekian yang saya sampaikan, dan mohon kepada Bapak Kepala Bappeda yang mendapat amanah dari Bapak Bupati untuk membuka acara ini, sekian dan terimakasih, kami akhiri wabillahitoufikwalhidayah wassalamualaiku wr. wb, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

2.1.2. Pembukaan dan Sambutan dari Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

Sambutan dan Pembukaan oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Bapak Drs Suparman M.Si

Assalamualaikum Wr.Wb, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, yang kami hormati Pimpinan tim dari CoLUPSIA dan yang kami hormati para pimpinan SKPD, puji sukur kita dapat bertemu di ruangan ini dalam rangka, Diseminasi Hasil Kegiatan CoLUPSIA dan Diskusi Penggunaan Hasil Kegiatan Dalam Penatagunaan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu. Sebelumnya kami mohon maaf kepada tim dari CoLUPSIA yang punya keinginan Bapak

Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang akan membuka, karena beliau tidak dapat hadir oleh karena kesibukan beliau sehingga tidak dapat membuka

acara ini, kelihatannya kurang mujur dari tim CoLUPSIA, karena sekarang disaat-saat sibuk dan beberapa pimpinan tidak bisa hadir dalam pertemuan ini.

Baik pada kesempatan ini saya akan sampaikan pesan dari Bapak Bupati, bahwa di dalam penyelenggaraan tata ruang di gariskan dalam rencana tata ruang nasional dalam menetapkan ruang untuk kepentingan masyarakat yang aman nyaman, tataruang Kabupaten Kapuas Hulu saat ini masih dalam proses, dan untuk di ketahui bahwa peraturan daerah tentang tata ruang Kabupaten Kapuas Hulu sampai saat ini masih dalam proses, masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tahun kemarin tepatnya bulan juli di stop atau di pending, sampai pasal 22, jadi sampai detik ini sudah mau satu tahun lebih, masih belum selesai, karena masalah pola ruang dan sampai saat ini juga surat tentang tata ruang belum direspon oleh Kementrian Kehutanan, sehingga itulah yang menjadi persoalan.

Berkaitan dengan penelitian yang di lakukan oleh pihak CoLUPSIA mujur juga karena apa yang kita bahas itu bisa member informasi atau data sebagai masukan di dalam usulan RTRW tersebut, tapi hari ini bukan untuk memutuskan sesuatu, melaikan untuk mendengar tentang persentasi apa data dan informasi yang telah di dihasilkan dari penelitian CoLUPSIA, karena data dan informasi itu baru bisa diputuskan untuk digunakan setelah ada tempat tersendiri, ada ruang tersendiri, karena sebab itu tidak bisa di putuskan sendiri, data dan informasi disini di pakai atau tidak itu tergantung pada yang berkuasa, milik kekuasaan daerah ini karena ada ranah politiknya juga RTRW bukan semata-mata persoalan konsep.

Bahwa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah hanya Areal Penggunaan Lain (APL) saja, di luar APL itu sudah menjadi wewenang pemerintah pusat, seperti yang di sampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan berkaitan dengan itu regulasi penyusunan rencana tata ruang di perlukan informasi dan partisipasi dari masyarakat termasuk juga lembaga-lembaga Non pemerintah seperti CoLUPSIA ini yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk itu, sifatnya dalam memberikan informasi itu boleh dan data kepada pemerintah.

Demikian kami sampaikan juga berkaitan dengan deklarasi Kabupaten Konservasi bahwa di dalam Rencana Aksi Nasional *Heart Of Borneo* secara jelas mereka mengakui belum ada payung hukum, meskipun di pandang sangat membantu fasilitasi yang berkaitan dengan Kabupaten Konservasi, tetapi di nyatakan di dalam renstra *Heart Of Borneo* (HOB), bahwa persoalan dasarnya pengelolaan kawasan konservasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat

belum memiliki landasan regulasi untuk kerja sama dengan pemerintah daerah, jadi deklarasi kabupaten konservasi hingga saat ini sebenarnya belum memiliki

payung hukum yang kuat, itu jelas disebut didalam renstra *Heart Of Borneo*, artinya saat ini atau istilahnya baru masuk kuping kiri, sukur-sukur keluar di kuping kanan itu paling tidak ada responnya, untuk itu apa yang kita lakukan harus seimbang antara lingkungan dan kepentingan manusia hidup.

Kabupaten Kapuas Hulu ada \pm 230 ribu jiwa masyarakat dan pasti setiap tahunnya bertambah, baik itu melalui proses kelahiran maupun pendatang, pasti memerlukan lahan, memerlukan ruang untuk bangun perumahan, lahan untuk budidaya, untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, jadi antara kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan manusia hidup harus sejalan, jangan hanya melihat kepentingan lingkungan hidup hanya semata - mata untuk kepentingan lingkungan hidup saja, sementara kepentingan hidup manusia di dalamnya masih belum mendapat perhatian yang memadai contoh seperti yang saya katakan tadi, Inisiatif Kabupaten Konservasi sebenarnya belum ada respon dari pemerintah pusat baik dari segi aturan maupun dari pola pembiayaan sama sekali belum ada, baik dalam bentuk konpensasi dari pemerintah pusat.

Sementara lebih dari 50% Kawasan Hutan adalah Kawasan Konservasi, baik lah saya kira kegiatan pada hari ini, mungkin saya mohon maaf saya tidak bisa hadir sampai kegiatan selesai nanti mungkin silahkan saja gunakan aula rapat Bappeda ini karena di bawah sudah ada yang menunggu saya yaitu dari kelompok petani sawit dari silat, ada yang harus di selesaikan. Baik saya kira kegiatan ini saya buka secara resmi, dan saya akhiri wabillahitaufikwalhidayah wassalamuallaikum warahmaturlahi wabarokatuh.

MC : Alfa Ratu Simarangkir

Terima kasih Pak Suparman atas sambutan dan telah membuka acara ini dan dilanjutkan dengan penyerahan souvenir dari CoLUPSIA kepada Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu. Baiklah kita langsung lanjutkan saja dengan materi/persentasi, untuk memanfaatkan waktu kita lebih optimal, persentasi pertama sekilas tentang proyek CoLUPSIA dan capai - capain hasil dari Proyek CoLUPSIA yang akan di sampaikan oleh Proyek Leader CoLUPSIA.

Fasilitator : Valentinus Heri

Seperti yang di sampaikan sebenarnya proyek CoLUPSIA sudah di mulai sejak Tahun 2010 dan sudah akan masuk di tahun terakhir dari proyek ini, jadi sebenarnya kenapa pertemuan ini penting sebenarnya ada dua hal : Ingin menyampaikan hasil proyek sudah sejauh mana capaian dan yang sedang berjalan. Kegiatan ini

merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dan merupakan sisa waktu yang tersisa di proyek ini hingga kedepan oleh karena itu kita bisa mendengarkan, sudah sejauh mana hasil dari capaian dan tujuan dari proyek ini di Kabupaten Kapuas Hulu, kepada Pak Yves Laumonier kami persilahkan.

Pesentasi sekilas tentang proyek CoLUPSIA, Main Purpose and Achievements Oleh: Yves Laumonier

Terimakasih, seperti tadi saya bicara, hari ini kita ada kesempatan untuk menjelaskan beberapa hasil dari proyek ini, hampir tiga tahun atau dua tahun di lapangan, kita koleksi banyak data dan sampai sekarang masih banyak orang disini yang belum melihat sama sekali hasil kita, mungkin dari awalnya juga waktu kita bikin workshop pertama di Putussibau banyak belum mengerti waktu itu fungsi proyek CoLUPSIA di mana ?, jadi memang itu kita mendapat suport dana dari Uni Eropa, karena itu kelihatan seperti ada masalah global tentang Hutan dan Lingkungan.

Untuk kerja sama Pemerintah Indonesia terutama di beberapa lokasi di Kabupaten, karena kita pikir itu yang sudah kita inisiasikan untuk kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten, memang kalau kita lihat sekarang ini di seluruh dunia tidak cuma di Indonesia fungsi ekologis yang disediakan oleh hutan makin hilang, dimana banyak masyarakat memiliki tingkat ketergantungan terhadap sumber daya alam, dan memang seperti Bapak-bapak, Ibu-Ibu lihat di televise di mana dunia International itu, para Ilmuwan memperkirakan bahwa emisi yang ditimbulkan oleh Deforestasi dan Degradasi hutan mencapai 20% dari seluruh emisi gas rumah kaca di seluruh dunia, itu memang bisa jadi masalah di masa depan bagi anak cucu kita.

Kalau kita lihat peta di pulau Borneo ini yang hijau tua itu memang sisa hutan, jadi kita bisa lihat begitu cepatnya hilang hutan di Indonesia, di Malaysia, di Serawak, di Sabah itu lebih parah lagi kerusakan di bandingkan di Indonesai, tapi kalau kita lihat di peta ini yang hijau tua itu masih bagus hutannya, Kabupaten Kapuas Hulu disini masih lumayan sisanya kawasan hutan untuk satu kabupaten memang masih banyak hutannya. Jadi untuk semua masalah tata guna lahan kita perlu sebuah perencanaan yang mendukung pembangunan juga, jadi tidak seperti yang bapak tadi katakana bukan cuma konservasi, akan tetapi harus ada juga perencanaan tata guna lahan yang mendukung pembangunan tanpa merusak lingkungan, jadi bagai mana bisa menghasilkan rencana tata guna lahan dan pengelolaan sumber daya alam secara kolaboratif dan adil ?, Itu fungsi atau tujuan dari proyek CoLUPSIA.

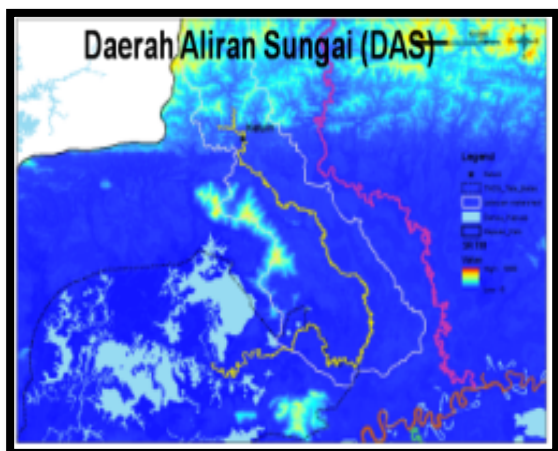
Kalau kita berbicara tentang tata guna lahan kolaboratif kita perlu suatu proses dan data, dimana kita sering melakukian diskusi untuk mengidentifikasi "Stakeholders" yang menentukan dan menginformasikan sistem tenurial, termasuk hak milik, akses, hak guna itu memang penting sekali, aspek atau kerangka kerja

legal dan Institusional tidak bisa di lewatkan, data pemerintahan, Institusi - Institusi masyarakat juga, data sosial-ekonomi, data geofisik – tata guna lahan, bentang lahan, resiko alam, tanah, erosi, hidrologi, data ekologi/biologi/penutupan lahan dan sekarang baru muncul tentang penilaian ecosystem (hutan, kebun, belukar), kalau

saya memang orang ekologi jadi untuk kali ini saya lebih fokus tentang data ekologi.

Ditujuan CoLUPSIA sebetulnya seperti apa yang saya sampaikan tadi, mendorong proses kolaboratif dalam perencanaan alokasi fungsi lahan, penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam dan mendorong pengembangan kelembagaan yang mempromosikan kebijakan dan instrument terkait lahan termasuk pengembangan masyarakat dan studi tentang pendekatan baru terhadap mitigasi kerusakan lingkungan dengan mengembangkan mekanisme insentif pembiayaan atas jasa lingkungan, itu satu mekanisme yang lagi di bicarakan di seluruh dunia dan baru mulai tapi tidak banyak aplikasi untuk sementara ini.

Tentang ekologi kita selalu mulai dengan studi penutupan lahan didukung dengan studi ekologi tipe-tipe hutan dan lingkungan, jadi kita banyak koleksi data tentang tipe - tipe hutan dan factor - faktor ekologi. Kita bekerja seperti ini pengelolaan kita itu adalah water shit, pengelolan Daerah Aliran Sungai dan Sub-Daerah Aliran Sungai sebagai unit pengelolaan, untuk kita itu jauh lebih mudah, untuk melakukan pekerja yang sangat detail di kabupaten karena itu satu unit yang di laporkan dan mudah di mengerti oleh masyarakat dan instansi-instansi terkait, semua data CoLUPSIA tersebut cocok bila dipadukan dan digunakan dengan DAS sebagai unit pengelolaan dan perencanaan tata guna lahan. DAS/Sub-Das digunakan karena berhubungan dengan vegetasi, topografi, kelerengan dan tanah, Unit-unit sub-DAS dapat dianalisis terpisah atau dikelompokkan sebagai satu kawasan yang homogeny.



Semua data Spasial lainnya dapat dirangkum dalam kawasan dari satu atau kelompok DAS, keuntungannya adalah DAS sebagai bentukan bentang alam yang tetap dengan mudah dapat dijadikan patokan dan dimengerti oleh semua pihak sesuai dengan Daerah Aliran Sungai, untuk data-data hidrologi lebih fokus sementara ini pengamatan hidrologi di daerah aliran sungai Leboyan dan Embaloh, dimana kita pasang stasiun pengamat curah hujan di hulu, tengah dan hilir sungai, supaya kita lebih mengerti bagai mana curah hujan dan monitor curah hujan di daerah situ, sesuai dengan sistem pemantauan muka air (aliran masuk dan keluar dan volume air permukaan yang masuk kedataran banjir) sesuai dengan musim.

Kita juga banyak studi tentang ekologi di hutan jadi kita punya beberapa lokasi di Kabupaten Kapuas Hulu dimana kita mengukur Biomassa, dimana jaman sekarang ini semua mengukur carbon, jadi kita juga ukur carbon, selain itu kita

juga melakukan kegiatan penelitian tentang validasi untuk tumbuh-tumbuhan ini lumayan kita sudah banyak plot, biasanya kita membuat plot 2 Ha atau 4 Ha di lokasi hutan, jadi di Kabupaten Kapuas Hulu total yang sudah kita plot seluas 12 Ha ini lumayan untuk bisa melakukan monitor, terutama untuk Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu untuk bisa melakukan monitor apakah ada perubahan dengan iklim dan data itu nanti sudah selesai akan kita copykan memang harus dikasi terutama pada instansi-instansi terkait.

Kita juga mau tahu karakteristik tentang erosi tanah dan lahan kritis, jadi kita tidak hanya di hutan, tetapi kita juga melakukan penelitian di tipe-tipe vegetasi lain seperti belukar, pemantauan erosi tanah di hutan, kebun karet dan ladang untuk yang estimasi misalnya erosi beberapa tentang pengelolaan, dan itu seperti contoh kita bisa lihat memang kalau erosi paling besar ada di tempat bekas logging dulu, sedikit logika karena ada di beberapa tempat dan jalan cukup berat dan yang jalan ekplotasi di situ slope lereng terlalu tras, kita bisa bandingkan dengan belukar bekas kebun dan kita bisa lihat belukar yang daerahnya cukup tajam, kita bisa lihat erosinya cukup tinggi tapi kalau tidak terlalu tajam sloponya seperti di daerah kebun karet sudah cukup tua memang erosinya sudah tidak ada, seperti contoh juga kita sudah hitung kalau dari kawasan hutan primer ada sekitar 40 ton Carbon/Ha dan kalau kita kalkulasi di bekas perusahaan kayu sudah turun samapai 18.8 ton /ha, disana memang sudah banyak carbon yang hilang tetapi bisa carbon kembali waktu di kebun karet, jika terdapat di kebun karet tua, itu sudah sama seperti hutan, jadi sistem tradisional di situ dengan tanam karet itu lumayan untuk di kelola dengan cukup bagus.

Jadi untuk sementara kita bicara tentang data-data yang di perlukan secara ekologis, saya pikir kita memang punya data ekologis kalau kita mau diskusi tentang tataguna lahan karena itu betul-betul memang bisa bikin relative serius dan kalau kita bisa buktikan di mana lingkungan rusak atau tidak tergantung dengan beberapa fungsi yang akan kita diskusi, waktu kita diskusi pemetaan di proyek CoLUPSIA, saya kira untuk ekologi sementara cukup, ini lagi lokasi kita tentang study-study kita, untuk study plot di kawasan hutan di daerah Keluin, ada juga di kawasan hutan rawa yaitu di Belatung dan ada juga di daerah Nanga Dua, karena tipe-tipe hutan cukup beda antara bagian selatan dan bagian utara, bagian utara masih belum selesai karena kita juga banyak study hutan di kawasan TNBK, kita tidak hanya punya data fisik, akan tetapi kita juga punya data social-ekonomi yang nanti akan di persentasikan sama Pak Bayu, terima kasih nanti kita bisa diskusi lagi.

Fasilitator Valentinus Heri. SH

Terima kasih Pak Yves, baiklah kalau dari penjelasan Pak Yves sendiri sebenarnya CoLUPSIA ini sudah mengumpulkan beberapa data social-ekonomi,

kemudian biofisik, sebenarnya ada juga kegiatan-kegiatan yang bersifat kolaboratif dalam perencanaan kabupaten sendiri dengan menggunakan metode (*Participatory Prospective Analysis/PPA*), nanti mungkin akan di jelaskan secara khusus dan yang paling penting sebenarnya proyek CoLUPSIA sudah menawarkan analisis spasial terutama terkait dengan tataguna lahan dengan dalam bentuk peta dan peta ini sangat penting karena kita tidak hanya membuat peta tetapi kita didukung oleh data-data yang dilakukan untuk mengecek misalnya data secara ekonomi dan biofisik dilakukan.

Saya kira memang waktu yang hampir selesai proyek CoLUPSIA mungkin bisa menjadi peluang untuk kita, karena hasil ini akan di serahkan ke pemerintah kabupaten dan pemerintah kabupaten bisa membicarakan Kapuas Hulu lebih baik kedepan, kita berikan kesempatan kepada Pak Bayu untuk menjelaskan dari hasil penelitian social-ekonomi. waktu dan tempat kami persilahkan.

Pesentasi Tentang Mendorong Proses Kolaboratif Dalam Perencanaan Alokasi Fungsi Lahan Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (PPA) Oleh : Pak Bayuni Shantiko

Terima kasih pak Heri, selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya Bayu, beberapa waktu dari 2010 saya memang cukup intens untuk melakukan kajian social-ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah sedikit gambaran mengenai kira-kira kajian yang kita lakukan untuk di 22 desa yang ada di Kapuas Hulu.

Jadi apa yang kita lakukan survey social-ekonomi di 22 desa di Kabupaten Kapuas Hulu terutama desa-desa yang berbatasan dengan hutan, jadi kita mau melihat bagai mana ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan, mata pencahariaannya dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, perebutan/ persepsi kepastian lahan, kondisi desa dan sejarah pengelolaan hutan, sejarah konflik dan pandangan lokal terhadap sumber daya alam, kepemilikan dan kepastian lahan, pengelolaan hutan, ancaman dan konflik.

Kemudian yang kita gunakan metodenya adalah survey social-ekonomi rumah tangga jadi kita datang ada kurang lebih 880 rumah tangga itu yang berada di 22 desa, kemudian juga ada diskusi kelompok (FGD) dan juga ada wawancara informan kunci, dari hasilkan kajian di 22 desa itu kita pilih secara acak, jadi kita tidak menentukan dari sekian desa kita list dari 200 desa di Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian kita pilih secara acak dan ini adalah konfigurasi yang kurang lebih bisa mencerminkan bagai mana sebaran desa - desa yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu, kemudia kita bagi menjadi empat klauster utama jadi utara, selatan kemudian timur, dan barat kita sebut plot 1, plot 2, plot 3 dan plot 4.

Plot 1. Mungkin lebih banyak bercerita mengenai bagaimana masyarakat itu bergantung dengan hutan, kemudian adanya isu penipisan sumber daya hutan

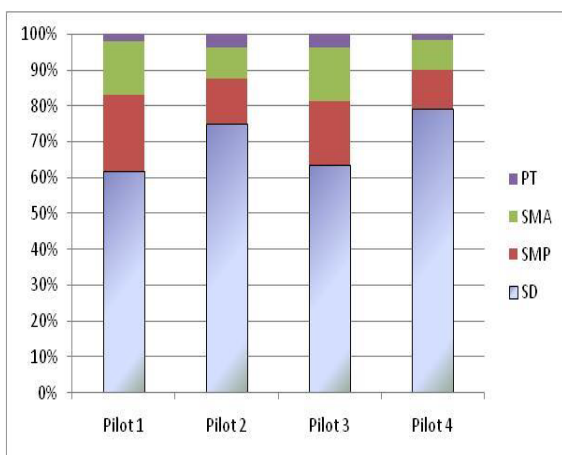
dan juga ada beberapa kasus - kasus dilapang yang kita lihat, adanya sengketa mengenai akses sumberdaya hutan, jadi masyarakat merasa bahwa mereka tidak bisa masuk atau mengambil hasil hutan, sementara mereka merasa bahwa itu di wilayah mereka;

Plot 2. Kita bisa lihat lokasinya ada di Hulu Kapuas di sana ada isu - isu penambangan emas rakyat dan juga masyarakat di sana masih juga bergantung terhadap hasil hutan non kayu seperti gaharu dan juga perikanan sungai dan kemudian yang penting di lokasi Plot 2 karena lokasinya mereka sangat di hulu justru ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi karena akses transport sulit dan semua akses melalui sungan selain itu biayanya cukup mahal;

Plot 3. Di bagian selatan Kabupaten Kapuas Hulu, mungkin di sepanjang jalan lintas selatan itu ada penambangan emas rakyat, juga bagaimana ada dinamika antara masyarakat atau di desa-desa yang mereka juga mulai menanam karet, atau ekspansi karet mulai cukup tinggi itu juga ada pegeseran lahan karet terhadap ladang, jadi ketika mereka menanam karet lebih banyak, mereka juga sudah sedikit berladang, sehingga hasil dari karet itu untuk mereka membeli makanan dan untuk bahan makanan yang selama ini bisa mereka peroleh dari berladang, jadi penghuni subsistem dengan penghuni ke yang lebih transaksi.

Plot 4. Lebih kedinamika pola lahan yang memang kita lihat sendiri di bagian selatan itu kelapa sawit sudah mulai berkembang, termasuk di daerah Silat dan di sekitarnya, kemudian adanya juga persepsi bahwa adanya kelapa sawit ini juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat untuk menjadi buruh harian sehingga sangat mudah bagi mereka untuk mendapat hasil dengan bekerja di perusahaan, tetapi disisi lain ada juga sengketa alokasi lahan bagi masyarakat yang mereka tidak mau membuka, tetapi mungkin mereka tetap mau mempertahankan lahan, ini dinamika yang kita lihat di Kabupaten Kapuas Hulu.

Tingkat Pendidikan Kepala Rumah



Kemudian ini singkat saja mengenai tingkat pendidikan rumah tangga, jadi tingkat pendidikan secara umum di Kabupaten Kapuas Hulu masih relatif rendah, karena masih ada tingkatan pendidikan di bawah SD masih sangat tinggi. Kemudian untuk penggunaan lahan kurang lebih ladang sekitar 0,5 Ha-1 Ha sedangkan kebun

1,5 Ha-3 Ha.

Kemudian selain itu yang menjadi temuan kita juga masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu ini juga yang desa hutan mereka bergantung lebih dari satu kegiatan, jadi mereka tidak hanya sebagai petani tetapi mereka juga menorah karet, ada juga sebagai pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan (masyarakat yang mengumpulkan hasil hutan bukan kayu, seperti rotan, gaharu dll), disini kita juga catat seberapa besar kontribusi dari tambang masyarakat, kontribusinya cukup tinggi tapi di bandingkan dengan jumlah masyarakat yang terlibat dengan jumlah yang di terima cukup kecil dan kalau kita berbicara berapa sebenarnya kontribusi yang dapat memang cukup tinggi, tapi kalau di bandingkan dengan biaya transportasi, biaya makanan, biaya hidup sehari-hari yang cukup tinggi yang tidak sebanding apa yang mereka dapat itu bisa juga menjadi indikator kompensasi.

Kemudian yang berkaitan dengan social-ekonomi dari kelompok yang terlibat disini kita bisa melihat dinamika masyarakat disini, juga masyarakat bergantung dari pertanian masih cukup besar di Kabupaten Kapuas Hulu. Kita berbicara masyarakat yang beraktivitas dan berapa jumlah yang mereka hasilkan dari kegiatan masyarakat desa mereka sendiri, disini bisa kita lihat di grafik periodik pertanian, perikanan cukup tinggi, pertanian dan perikanan ada juga yang di petakan dan cukup menonjol yaitu di Desa Nanga Dua di Hulu Kapuas yaitu mendapat kontribusi dari tambang emas rakyat, kontribusinya cukup tinggi, tapi dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang terlibat cukup kecil dan kalau kita bicara berapa sebenarnya kontribusi yang di dapat memang cukup tinggi, tetapi kalau di banding dengan biaya transportasi, biaya makanan, biaya hidup sehari-hari yang cukup tinggi yang tidak sebanding apa yang mereka dapat itu bisa di jadikan indikator kompensasi, kemudian berkaitan dengan hasil social-ekonomi, berikutnya adalah kita coba melakukan di Kabupaten Kapuas Hulu dengan melakukan identifikasi kemungkinan potensi pelestarian lingkungan untuk di coba di lokasi plot.

Artinya kita perlu melakukan satu implementasi kegiatan tapi kita juga melihat ketergantungan apakah jasa lingkungan atau PES ini bisa di kembangkan di Kabupaten Kapuas Hulu dan kita mencoba kemungkinan apa saja yang harus kita lakukan dan persiapan dan kepastian apa saja yang harus di miliki oleh bapak dan pihak di Kabupaten Kapuas Hulu.

Contoh-contoh PES atau Jasa lingkungan ini ada diberbagai negara tidak hanya di Indonesia saja, penyerapan dan penyimpanan carbon, misalnya tidak menebang pohon secara sembarangan dan melestarikan pohon, proses dimana pohon - pohon itu dijaga dan kemudian dijadikan nilai ekonomi atau identik dengan harga karbon, hasil dari penyerapan carbon kemudian perlindungan carbon-carbon hayati, tidak kreatif dan efisiensi tapi sulit dikelola karena bicara carbon cukup banyak yang harus di perhatikan, dan di kelola tidak cukup air saja akan tetapi menyangkut tata hutannya, kemudian satwanya harus

diperhatikan yang cukup umum diperhatikan dan lebih sering didorong adalah perlindungan aliran sungai.

Aliran sungai di dorong oleh Jasa Lingkungan karena bagaimana menjaga hubungan hulu sungai dan daerah hilir sungai, yang menggunakan daerah hilir sungai dan hulu sungai bersedia melindungi masing - masing kawasan, yang berkepentingan di daerah hilir sungai misalnya perusahaan air dan karena kebutuhan mereka menggunakan air bersih dan bisa memastikan hulu tidak terjadi kerusakan. Masyarakat atau pihak yang ada di hulu supaya tidak merusak lingkungan, supaya mendapat manfaat air yang bersih itu adalah mekanisme di mana wilayah hilir dan wilayah hulu bisa memberikan kompensasi terhadap masyarakat atau pihak - pihak yang berkaitan, untuk aliran sungai itu lebih bagaimana hubungan daerah hulu dan daerah hilir suatu keinginan untuk membayar agar bisa melindungi aliran sungai tadi, kemudian yang terakhir bagaimana kita mempunyai suatu tempat yang indah dan kemudian menjadi suatu tempat wisata yang bisa menghasilkan pendapatan dan masyarakat yang berdomisi disitu karena menjaga wilayahnya tetap indah, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon sembarangan dan menjadi suatu destinasi wilayah wisata.

Untuk melakukan identifikasi tadi paling tidak kita melakukan beberapa tahapan identifikasi misalkan : melakukan identifikasi apa yang ingin kita lakukan kira - kira apa yang cocok dan persiapan - persiapan pemetaanya, membuat payung hukum, kemudian melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaannya dan sampai dengan tahap yang ingin kita lihat apakah bersinergi dengan Kabupaten Kapuas Hulu.

Sebagai penutup dari persentasi saya ingin menyampaikan bahwa dari hasil survey social-ekonomi bahwa Kabupaten Kapuas Hulu ini masih ada masyarakat tergantung dengan wilayah hutan, yang terlibat cukup banyak dari jumlah orang, yang terlibat dalam kegiatan berbasis dengan kawasan hutan artinya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan masih tinggi, misalnya hutan di rambah dan hutannya hampir habis secara otomatis mereka kesulitan dan tidak mungkin bisa menderita, ada persepsi masyarakat bahwa hutan dan lahan masih luas dan tersedia ini bisa dikonfirmasi dengan instansi terkait, memang kepadatan penduduk 7 km/m² yang artinya lahan masih luas.

Tapi masih ada satu tekanan dan tidak ada kepastian, masih ada satu peluang di masa depan bahwa masyarakat makin bertambah, seperti yang di sampaikan oleh Bapak Kepala Bappeda, kemudia ada ketidak kepastian hukum yang membuat akses masyarakat semakin kecil terhadap sumberdaya alam, kemudian di sisi lain masyarakat berharap beberapa kawasan hutan untuk di pertahankan dan menjadi satu mekanisme untuk bagaimana pengelolaan hutan

secara berkelanjutan, selain itu bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat dalam hal pemanfaatan sumber daya alam.

Fasilitator Valentinus Heri. SH

Terimakasih Pak Bayu dari paparan persentasi yang di sampaikan Pak Bayu, sebenarnya bisa kelihatan bahwa data yang kita kumpulkan terkait dengan data ekonomi besiknya adalah penelitian jadi bisa kita limpahkan kepada Pemerintah Kabupaten itu sendiri untuk membicarakan kedepan, kita member kesempatan kepada peserta untuk, tanya jawab.

SESSI TANYA JAWAB

Pertanyaan Pak Makmur. AS (Kepala Kantor BPN Kapuas Hulu)

Terimakasih atas kesempatannya selamat pagi Bapak, Ibu sekalian, sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya belum paham apa CoLUPSIA ini ?, merupakan Projek Loan atau Hibah ?, apakah ini hanya projek NGO atau keberadaan di Indonesia seperti apa ?, apakah ini hanya seperti risert atau ada kegiatan-kegiatan lain ?, minta kejelasan sesuai dengan tataguna lahan, karena saya dari Badan Pertanahan pak, karena mengenai tata guna lahan dan juga berkaitantan dengan peranan kami sebgai BPN Kabupaten Kapuas Hulu.

Jawaban/Tanggapan Dari Pak Yves Laumonier

Ya terima kasih, tentang pertanyaan, proyek ini bukan loan akan tetapi ini adalah grant dari Uni Eropa dan program dulu Tropical Forest Project Loan itu ada khusus penelitian Development semua Projek CoLUPSIA bagian dari penelitian Development, biasanya harus ada partner antara orang peneliti seperti saya dari CIRAD di Prancis, CIFOR di Bogor itu lembaga International untuk riset ekonomi dan kehutanan, juga ada patner dari Universitas di Indonesia dan juga patner dari LSM lokal yang sebenarnya harus fasilitasi dan implementasi dari hasil penelitian kita. Kita berkedudukan di CIFOR, kita juga ada partner FORDA yang lembaga penelitian di Departemen Kehutanan ada komponen penelitian yang cukup besar, tapi tidak hanya publikasi buku-buku harus ada implementasinya dari hasil penelitian kita. Maka diskusi hari ini sangat penting untuk kita diskusi, karena hasilnya akan kita ekspose di tingkat Provinsi dan Jakarta antara BAPENAS, Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan, ada beberapa hal dimasa depan bisa di follow up dengan hasil-hasil yang kita punya, jadi memang nanti ada persentasi lagi tentang spasial planning yang secara lebih kelihatan petanya dan tentang alokasi lahan, nanti bapak bisa lihat lebih dulu dan nanti bisa kita diskusikan lagi.

Fasilitator Valentinus Heri. SH

- ❖ Masih ada pertanyaan Pak Makmur. AS (Kepala Kantor BPN Kabupaten Kapuas hulu)

Pertanyaan Pak Makmur. AS (Kepala Kantor BPN Kapuas Hulu)

Terima kasih atas informasinya jadi sudah mengetahui bahwa proyek ini adalah Grant dari Uni Eropa dan itu di berikan kepada NGO/LSM untuk melaksanakannya, harapan pemerintah terkait dengan Kabupaten Kapuas Hulu, berharap kedepan harus banyak koordinasi dengan instansi terkait, Pemerintah Daerah sangat memerlukan informasi yang komplit tentang tata guna lahan dan memerlukan konsultasi, tidak hanya melakukan penelitian.

Mengenai pelatihan GIS terhadap stakeholder yang ada di sini dan jika ada pelatihan-pelatihan GIS kami siap untuk mengikuti pelatihannya dan di sana juga kami memerlukan informasi-informasi yang akurat, ada penjelasan dan diskusi yaitu penjelasan bahwa ada isu-isu di masyarakat yang memperebutkan lahan dan sesuai yang di sampaikan oleh Bapak Suparman tadi, ada beberapa hal yang berkaitan dengan deforestasi dari beberapa pihak yang tidak disadari baik yang di sengaja maupun tidak di sengaja, ada salah satu media dan hak-hak tradisional ini sebagian besar menurut saya masih kompetebel di bedakan.

Terus masyarakat yang mana masyarakat yang kami jumpai baik di desa maupun di kecamatan sering bertanya – tanya kepada kami sulit untuk kami jawab, pak yang manakah batas hutan, pak yang manakah batas desa kami, saya tanya siapa yang tahu, saya tanya bapak yang tahu tentang desa bapak, bagaimana cara kami mendorong untuk tetap dalam proses regulasi - regulasi, tetapi ini juga masih dalam proses untuk regulasi-regulasi terutama mengenai penyelesaian batas desa, tapi yang jelas kita harus duduk bersama, tapi kami bisa mendorong dan bisa di lakukan semacam Fokus Group Discussion atau multi group atau apapun bentuknya yang bisa membuat, kami terbantu karena terutama dari sisi pengetahuan kami minim, kami juga tidak bisa melakukan studi-studi terus dan tidak mendapatkan hasil, kami juga sangat ingin ada hasil yang dapat terimplementasikan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Ada lagi lahan gambut tampak gundul. Secara aturan dari Jakarta, bahwa gambut-gambut di atas kedalam 3 meter tidak boleh diberikan izin, tapi siapa tahu ternyata ada gambut di sekitar kita yang lebih dari 3 meter yang masih di usahakan perusahaan swasta atau perusahaan sawit, BPN tidak bisa mengontrol, nanti mungkin bisa membentuk kelembagaanya, siapa yang mengontrol lahan gambut ini sehingga pengurangan laju deforestasi itu bisa teratasi dan ada satu tim, ada suatu lembaga kontrol terbentuk yang harus di bentuk.

Kemudian mengenai konversi-konversi seperti apa besarnya ini juga banyak dilaporkan, apakah konversi-konversi ini masih bisa di toleransi atau

tidak. Apa yang di sampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu 51,56% adalah hutan diwilayah Kabupaten Kapuas Hulu atau yang di sebut Kabupaten Konservasi, mengapa muncul kebun-kebon terus, kami kantor BPN mempunyai fungsi memberikan pertimbangan teknis, ada pertimbangan yang kami berikan kepada pemerintah, ada semacam rambu-rambu, misalnya ini sangat dekat dengan sungai, yang ini dalam gambutnya dan sangat di sayangkan ini akan terjadi kerusakan lingkungan itu semua tergantung kepada pemerintah daerah yang memberikan keputusan, misalnya di perlukan berpuluh-puluh ribu hektar, mungkin pertimbangan kami ini tidak sampai.

Berpuluh - puluh ribu hektar tapi cuma 5 hektar karena ini perlu pertimbangan teknis kami sangat sesuai, tetapi kembali kami yang hanya memberikan pertimbangan teknis, jadi yang bisa di pakai atau tidaknya bawa tapi kami tetap mendukung, bahwa adanya perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan kami sangat memerlukan bantuan bagaimana merumuskan ini tata ruang baik secara umum atau secara khusus, sehingga pertanyaan - pertanyaan Pak Camat misalnya sering kami jumpai, Pak kami mau buat sertifikat kok tidak boleh, karena daerah bapak masuk dalam kawasan hutan, terus kenapa kami tidak diberitahu, nah itu beberapa masalah yang sering kami temukan dilapangan, harapan kami jika ada kegiatan/program baik itu dari Luar Negeri/dari patnernya Uni Eropa, bisa membantu kami kedepanya, sehingga kegiatan - kegiatan perencanaan kita kedepan bisa kita dorong untuk ke arah yang lebih baik, saya kira cuma itu yang saya sampaikan.

Jawaban/Tanggapan dari Pak Bayu Shantiko

- ❖ Ya saya kira apa yang di sampaikan oleh Bapak dari BPN merupakan masukan yang sangat bagus juga, karena itu juga menjadi isu yang akan kita diskusikan dalam pertemuan hari ini.

Jawaban/Tanggapan dari Pak Yves Laumonier

- ❖ Ya sama mungkin itu masukan yang bagus dan nanti bisa kita diskusikan di terakhir nantinya

Fasilitator Valentinus Heri. SH

- ❖ Oke terimakasih Bapak-bapak kita istirahat dulu, nanti bisa kita lanjutkan lagi diskusi kita.

MC : Alfa Ratu Simarangkir

- ❖ Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu kita akan lanjutkan pertemuan kita hari ini dengan pemaparan persentasi dari Pak Bayuni Shantiko, tentang PPA dan Skenario yang di sepakati bersama, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Bayu.

Fasilitator Valentinus Heri. SH

- ❖ Sebenarnya tadi sempat di singgung tentang PPA (*Participatory Prospective Analysis*), sebenarnya kalau dilihat dari judul proyek ini Collaborative, sebenarnya proyek ini juga menawarkan perencanaan Kabupaten Kapuas Hulu untuk 20 tahun kedepan itu dengan melibatkan berbagai pihak, jadi kita sebenarnya mengajak stakeholder untuk memikirkan bersama-sama, waktu itu kita menyepakati ada perwakilan dari berbagai pihak, untuk lebih jelas kita minta Pak Bayu untuk menjelaskan, apakah itu PPA dan apa itu scenario bersama, untuk itu silahkan Pak Bayu.

Pesentasi tentang PPA (*Participatory Prospective Analysis*) dan Skenorio Bersama. Oleh : Pak Bayu Shantiko

Berbicara mengenai skenario kedepan kita lihat brosur, apa skenario kedepan bercerita sedikit bagaimana kita dapat menghasilkan apa skenario itu tadi, pertama kita ingin melihat masa depan Kabupaten Kapuas Hulu ini seperti apa atau kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi dengan Kabupaten Kapuas Hulu kedepan, mengapa kita diskusikan ini karena kita ingin mengajak para pihak untuk bersama – sama memikirkan apa yang terjadi dengan Kapuas Hulu kedepan, sehingga kita ada kesepakatan dan pemahaman bersama tentang apa yang terjadi di masa depan, agar kita semakin mudah untuk bersama – sama bagaimana mencapainya, agar tidak terjadi hal – hal yang tidak kita ingin dan mengantisipasi hal-hal tersebut. Seperti yang kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Kepala BAPEDA dan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu adalah Kabupaten Konservasi dan Kabupaten Kapuas Hulu juga masih dalam masa membangun dan kita melakukan kegiatan pembangunan dengan memprioritaskan pembangunan dalam bentuk konservasi.

Kemudian ada keinginan untuk menjadikan satu payung hukum untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di Kapuas Hulu, apa yang terjadi 20 tahun yang akan datang itu yang di pertanyakan kita semua, kita menggunakan satu pendekatan yang di sebut sebagai pendekatan *Perspektif Partisipative Analisis / Participatory Prospective Analysis* (PPA) adalah metode analisis proyek kami di CIRAD macam mana kami membangun misi bersama dan pemahaman bersama agar mendorong bagaimana mengimplementasikan misi tersebut.

Kemudian kita melibatkan berbagai pihak di Kabupaten Kapuas Hulu dan waktu itu kita melibatkan SKPD, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Pertambangan, Dinas Perikanan dan juga melibatkan masyarakat,

Tokoh Pemuda dan ada juga beberapa perwakilan dari DPRD untuk membahas apa yang mungkin terjadi dengan Kabupaten Kapuas Hulu untuk masa mendatang, kemudian yang dilakukan dalam proses ini kita melakukan serangkaian workshop beberapa analisis kira-kira apa yang menjadi faktor yang berpengaruh untuk masa depan atau tindakan pembangunan di masa depan dan hasil skenario ini bisa menjadi kegiatan perencanaan, yang kita lakukan dalam serangkaian workshop yang dilakukan di bulan Mei dan Juli 2011 dan kita berikan dengan konsultasi publik di tingkat kecamatan dan kabupaten tahun 2011-2012 dan juga workshop 2011-2012 memverifikasi yang kita hasilkan melewati proses analisis skenario tadi atau PPA.

Ini adalah gambaran bagaimana kita melakukan diskusi-diskusi di Putussibau dan juga sebagian di Pontianak yang terlibat dalam proses ini, bagaimana kita mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan di Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian didalam proses-proses tersebut kita menghasilkan 50 variabel yang mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu dan ada beberapa macam variabel yang mempengaruhi lingkungan Daerah Kapuas Hulu, ada Kebijakan Pemda, Penggunaan Teknologi, Hukum Adat dan Kearifan Lokal, Pola Pikir, Partisipasi, Pendidikan dan Keterampilan, selanjutnya dari 50 variabel itu kita coba analisis dengan metode ini (PPA), dimana sudah dilengkapi dengan pendekatan pengajuan variabel kunci, kita menemukan variabel kunci yaitu Kebijakan Pemda, Penggunaan Teknologi, Hukum Adat dan Kearifan Lokal, Pola Pikir, Partisipasi, Pendidikan dan Keterampilan itu yang menjadi variabel kunci dan hasilnya empat skenario seperti apa yang bapak lihat.

Skenario ke (1), **Langkah Serampak** adalah menceritakan mengenai organisasi antara kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan direncanakan bersama masyarakat dan swasta kemudian penggunaan lahan ditentukan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, swasta dan pemerintah daerah.

Skenario ke (2), **Lempar Koin Sembunyi Tangan**, menceritakan ternyata kebijakan pembangunan itu lemah tidak menjawab kebutuhan penting dari masyarakat, sehingga masyarakat tidak peduli dengan penggunaan lahan, tidak menggunakan kearifan pada akhirnya menimbulkan kerusakan hutan dan lingkungan serta masyarakat termarginalkan;

Skenario ke (3), **Mendulang Emas Mendapat Batu**, menceritakan mengenai konflik di masyarakat, karena adanya pihak – pihak yang tidak dilibatkan dalam pembangunan, kemudian ada kemiskinan dan ketimpangan mendorong apatisme publik itu yang terjadi di masyarakat dan menghasilkan satu konflik.

Skenario ke (4), **Makan Tuba Buah**, menggambarkan suatu kondisi pembangunan yang stagnan yaitu pembangunan berjalan tapi pelan sekali rencana pemda berubah – berubah tidak ada prioritas dan di masyarakat hanya sebagai pecintaan saja.

Dari empat skenario ini yang merupakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu. Skenario Satu Langkah Serampak, kemudian ada Skenario Dua, Skenario Tiga dan Skenario Empat yang mana kemungkinan terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu, pertanyaannya adalah ketika kita konsultasi publik ke masyarakat mana masa depan yang ingin di capai oleh Kabupaten Kapuas Hulu, apakah Kabupaten Kapuas Hulu yang harmoni atau apakah Kabupaten Kapuas Hulu yang mengalami kerusakan lingkungan, apakah Kabupaten Kapuas Hulu yang konflik atau Kabupaten Kapuas Hulu yang berjalan lamban dan mana yang dipilih dan berdasarkan hasil dari konsultasi publik di Kecamatan dan ditingkat Kabupaten dan beberapa rangkayan lokakarya kami di Putussibau itu menghasilkan bahwa yang di inginkan terjadi oleh para pihak di Kabupaten Kapuas Hulu adalah Skenario Pertama.

Jadi bagaimana skenario yang pertama ini bisa terjadi, bahwa antara organisasi yang mengambil sebuah kebijakan, tata guna lahan yang mungkin mengakomodir aspirasi masyarakat, swasta dan juga pemerintah daerah yang ada sinergi antara Hukum Adat dan Hukum Nasional ini yang terjadi pada skenario satu yang menjadi pilihan, untuk mencapai itu, kemudian pertanyaannya adalah bagai mana kita mencapai skenario satu ini, karena skenario satu ini seperti kondisi yang cukup baik, kemudian kondisi masyarakat yang baik dan bagaimana mencapainya ke arah skenario yang pertama, kemudian di dalam proses kita selanjutnya, kita membuat suatu diskusi dengan parapihak yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dan itu menghasilkan beberapa kesempatan rencana tindak lanjut dan bagaimana cara kita bisa mencapai Skenario yang kita inginkan atau bagai mana mencapai kondisi didalam Skenario Langkah Serampak tadi, harmoni masyarakat, harmoni swasta dan harmoni pemerintah daerah dalam penggunaan tata guna lahan yang kita inginkan.

Cara untuk mencapai yang pertama adalah program rancang ruang peruntukan lahan ini berdasarkan kondisi saat ini yang masih ada tumpang tindih, tadi seperti apa yang di sampaikan oleh Bapak Kepala Bapeda dan juga Bapak Dinas Perkebunan dan Kehutanan bahwa masih ada ketidak pastian dari hukum maupun ketidak pastian dari tata batas sendiri, beberapa tindakan yang kita lakukan bisa mengkoordinasi dan pemantapan serta kesiapan untuk melakukan pemetaan ulang terhadap peruntukan lahan, seperti masukan dari bapak dari BPN, kemudian ada pengumpulan aspirasi dari masyarakat mulai dari wilayah kawasan sampai administratif, tepat dan akurat dan juga yang penting bagaimana memfasilitasi konsultasi dan mediasi masyarakat dengan pihak lain.

Kemudian langkah kedua yang bisa dilakukan bagaimana melakukan penguatan kolaborasi antara pelaku atau komponen pembangunan yaitu Pemda, kemudian masyarakat dan swasta bisa membuat kesepakatan para pihak, memaksimalkan fungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang dan *social cost* dalam perencanaan pembangunan, kemudian ada pengakuan masyarakat terhadap wilayah adat dan juga pemilihan komoditas yang ramah lingkungan.

Berkaitan dengan aspek hukum dalam tataguna lahan, saya akan sedikit mereview saja, kita melakukan berbagai macam kajian dan juga kunjungan di lapangan, untuk melakukan kajian aspek hukum tadi, seperti juga persoalan yang berkaitan dengan hukum itu tadi. Kemudian yang menjadi temuan kita adalah penataan ruang membuka kesepakatan terhadap partisipasi masyarakat, tetapi prosesnya tidak oprasional dan penetapannya justru yang *Top-down* atau dari atas ke kebawah. Kemudian BKPRD mempunyai peranan penting tapi masih ada persoalan koordinasi, kemudian pendanaan yang lebih masif, kemudian ini juga yang di samapaikan legalitas batas lahan yang masih belum jelas, ada beberapa desa yang masih berada di dalam kawasan hutan, kemudian untuk penataan lahan yang masih sedikit sekali dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan bagian dari *Participatory Prospective Analysis/Proses PPA* dan aspek bagian hukum tata guna lahan.

Fasilitator Valentinus Heri. SH

❖ Terimakasih Mas Bayu, berikutnya Pak Yves akan mencoba menyampaikan tentang progres modeling tentang tata guna lahan, jadi sebenarnya dari proyek ini sudah menawarkan analisis spasial berupa peta, apa bedanya peta yang di buat oleh proyect CoLUPSIA di bandingkan dengan peta-peta yang ada, mungkin ini menjadi pertanyaan yang menarik dari teman-teman peserta untuk melihat seperti apasih tawaran dari project CoLUPSIA. Berkaitan dengan Modeling dan Data Spasial.

Pesentasi Oleh: Yves Laumonier

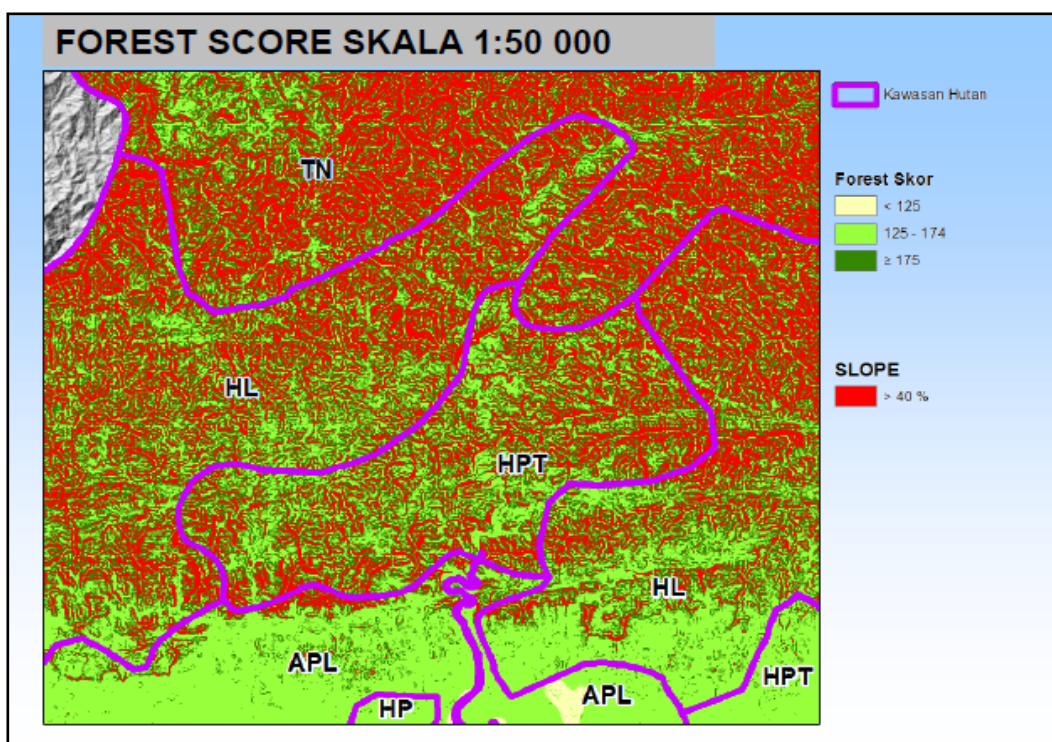
Seperti yang Pak Heri bilang saya akan mempersentasi tentang pemetaan di project CoLUPSIA, memang proyect tata guna lahan kita akan diskusi tentang status lahan diKabupaten, dan persentasi ini juga dibuat oleh teman saya juga Pak Danan ada disini juga, Pak Danan itu yang banyak menguasai tentang teknis jadi kalau ada pertanyaan tentang teknis nanti bisa dijawab, seperti kita ketahui semua di tahun 2011 sudah ada RTRWK Kapuas Hulu, sebetulnya untuk penyusunan tata guna lahan, ada tiga komponen yang bisa di gabungkan informasi yang akurat tentang penutupan lahan, kesesuaian lahan dan status lahan, kalau status lahan tidak jelas bagi semua pihak di satu tempat memang perencanaan tata guna lahan tidak ada dan Ijin Lokasi juga tidak dapat di implementasikan seperti contoh project REDD carbon tidak bisa di implementasikan, beberapa proyect REDD ini.

Status lahannya atau kawasan sejauh ini yang masih resmi di buat tahun 2000 untuk Kabupaten Kapuas Hulu status kawasan seperti Hutan Konservasi (HK/TN), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Areal Penggunaan Lain (APL), sebetulnya yang akan saya perlihatkan bahwa

ada kelemahan untuk pemetaan perencanaan status lahan, karena data spasial yang di gunakan sampai saat ini tidak terlalu detail, karena dari dulu pengerjaan proyek dalam proses penyusunan peta TGHK memang dibuat dari skala 1:250.000 dan sampai saat ini masih menggunakan peta dengan skala 1:250.000, itu bikin masalah kalau kita bekerja ditingkat Kabupaten atau Kecamatan.

Ketika data spasial yang di gunakan tidak cukup detail untuk tujuan pelaksanaan tata guna lahan dan ketika kita mencoba menggunakan untuk di implementasikan di lapangan, sering kali orang melakukan skala di perbesar misalakan dengan skala 1:100.000, bearti batas dari peta dengan skala 1:250.000 di zoomkan menjadi 1:100.000, ini secara pemetaan betul - betul bisa membuat error dan rumit, selain itu juga bisa membuat masalah, dikarenakan data spasial tidak akurat di skala yang lebih besar dan zonasi memang tidak sesuai dengan tofografi, hidrografi atau tutupan lahan di lapangan, selain itu bisa membuat orang di lapangan bingung, masyarakat juga bingung dan semua orang tidak tahu di mana batas lokasi, karena tidak jelas batas lokasi dan peta di ketahui oleh masyarakat,

sering terjadi di ambil dari peta sekunder di lapangan yang peta dari skala 1:250.000



dan terpaksa di cari dilapangan, itu memang secara spasial, spesialis pemetaan itu

tidak berarti dan status hukum juga tidak jelas.

Kalau kita lihat sekarang antara Skala 1:50.000 dengan skala 1:250.000, kita buat disini dengan peta topografi yang di buat dari Skala 1:50.000 sama zonasi yang di pakai skala 1:250.000 dan kita akan identifikasi beberapa masalah, hampir di mana-mana ada sedikit mungkin seperti contoh kalau kita perbesar disuatu daerah di bagian utara dan bagian barat di Kabupaten Kapuas Hulu kita bisa lihat misalnya, kalau secara logika misalnya ini Hutan Lindung, di bukit kecil ini lumayan posisinya mungkin bisa sedikit lebih besar, ini juga dari pada bundar seharusnya dibuat sesuai dengan topografinya, tapi memang kelihatan di situ logika ada Hutan Lindung, kalau kita lihat yang lain antara Hutan Produksi dengan Hutan Produksi Terbatas tidak ada logika lagi, karena memang topografinya hampir sama tidak sesuai dengan klasifikasinya, ini juga misalkan suatu contoh Hutan Lindung harus sedikit lebih besar dan akurat, dan itu ada efek untuk semua klasifikasi aplikasi zonasinya.

Sebetulnya orang kehutanan di sini sudah tahu, tapi untuk kemungkinan yang lain itu dibuat zonasi itu di buat dengan skor hutan dari Departemen Kehutanan, skor hutan itu ada koordinasi dari tiga variabel yaitu *Kelerengan* dari landai sampai curam, erodibilitas tanah dari rendah sampai tinggi, intensitas curah hujan dari rendah sampai tinggi, jadi dengan tiga variabel itu bisa dapat skor kelerengan, erodibilitas dan intensitas curah hujan jadi namanya skor hutan itu dibuat oleh Departemen Kehutanan, kalau skor kehutanan di dapat, ≥ 175 itu Hutan Lindung, sedangkan 125 – 175 itu Hutan Produksi Terbatas, sedangkan ≤ 125 Hutan Produksi biasa.

Jadi kita identifikasi seperti tidak berdasarkan skor hutan dalam perencanaan tata guna lahan yang detail tingkat kabupaten ada masalah dengan skala, tapi juga skor kelerengan tidak sesuai dengan untuk pengelolaan daerah aliran sungai atau pertanian, karena ada perbedaan kelas lereng antara Departemen Kehutanan sendiri dan instansi lain yang mengurus pengelolaan lahan (PPTA, Departemen Pertanian) bisa beda, di Departemen Kehutanan sendiri (BAPLAN, BRLKT) mereka menggunakan klasifikasi daerah yang beda jadi itu bisa menurut kita macam ada keterbatasan dengan sistem ini, karena dulu dibuat untuk TGHK dan di buat secara nasional waktu itu data tanah di Indonesia secara nasional tidak terlalu lengkap, waktu itu tahun 80an, jadi untuk kondisi sekarang ini sudah tidak terlalu akurat, apa lagi sekarang ini bisa menggunakan data lapangan yang jauh lebih lengkap.

Skor hujan juga bisa selalu di buat dengan asumsi, kalau curah hujan tinggi artinya erosi tinggi, akan tetapi seperti kita ketahui keberadaan stasiun lokal di Kabupaten Kapuas Hulu sangat sedikit sekali, sementara untuk mengetahui data Kelerengan (DEM dengan peta topografi skala 1:50,000 BAKOSURTANAL), Erodibilitas tanah (Peta geologi, land unit dan expertise) dan intensitas curah hujan Peta bioiklim (Fontanel and Chantefort; worldclim database), perlu membuat suatu stasiun lokal sebagai lokasi pengamatan/penelitian. Di proyek ini kita tetap menggunakan metode Skor Hutan dan jangan sampai orang melihat ada perbedaan

dalam menentukan Skor Hutan, yang mana Basis kita untuk Skor Hutan, CoLUPSIA menggunakan Skor Hutan yang di buat oleh Departemen Kehutanan, selain itu kita sekarang bisa melakukan Proyeksi sendiri, dengan menggunakan data-data dari instansi lain yang memiliki data lebih lengkap, misalnya data dari BAKOSURTANAL dengan menggunakan data Peta dengan Skala 1:50.000, bukan data sempurna dan harus kita lakukan verifikasi, harus koreksi lagi, akan tetapi lumayan hampir diseluruh indonesia dengan skala 1:50.000 bisa kita gunakan di Kabupaten lain. Di Kabupaten Kapuas Hulu sendiri kita tidak ada masalah dengan data karena kita bisa buat dengan DEM yang cukup akurat begitu juga dengan data tanah dan data curah hujan kita koleksi sendiri, selain itu untuk melihat curah hujan kita memasang beberapa alat untuk melihat seberapa besar curah hujan yang terjadi di beberapa lokasi penelitian di Kabupaten Kapuas Hulu.

Kalau sekarang kita lihat Forest Skor dengan Skala 1:50.000 di bandingkan dengan zonasi yang di gunakan di Kabupaten ini banyak sekali perbedaan, kalau kita lihat beberapa status kawasan hutan misalnya : Hutan Produksi Terbatas dan di bagian Taman Nasional, dengan menggunakan data Forest skor skala 1:250.000 kelihatan semua batas sudah tidak cocok lagi kalau kita bandingkan dengan data Skala 1:50.000 maka akan kelihatan batas-batas kawasan hutan yang ada di lapangan dan kita juga bisa main - main dengan batas - batas seperti batas Taman Nasional dimana kita bisa tahu di lapangan dengan skala detail jauh lebih mudah, di mana batasnya itu memudahkan untuk orang lain melihat di mana batas Taman Nasional.

Untuk seluruh di Kabupaten Kapuas Hulu kita juga bisa lihat dengan skala 1:50.000 dengan membuat zonasi yang lebih besar, dengan menggunakan metode Departemen Kehutanan, karena skala peta lebih detail dan memang cukup besar perbedaan hasilnya dalam menentukan status kawasan hutan, misalnya Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung, kalau kita plotkan yang usulan rencana tata ruang dari Pemerintah Daerah ke Departemen Kehutanan atau ke Provinsi, memang sedikit berbeda dan kita lihat ada beberapa masalah di beberapa tempat, misalnya di bagian selatan dan bagian utara, seperti kita lihat bagian utara yang memiliki gambut dalam ada sedikit masalah khususnya di sekitar Danau Sentarum, seperti usulan saya kedepan Pemerintah Daerah dapat membuat sesuatu yang lebih baik dan akurat terutama dalam membuat zonasi tata guna lahan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Kesimpulan

- Rencana Tata Guna Lahan dan beberapa zonasi (KPH,Taman Nasional) tidak dapat dilaksanakan (Polah ruang) sebelum ada Peta Kawasan Hutan dan Perairan yg akurat,sesuai dengan skala besar, karena belum di setuju di Provisi atau di jakarta kita punya kesempatan yang baik untuk berkomunikasi dalam membuat peta di tingkat Kabupaten dengan

menggunakan data yang lebih akurat dan sedikit lebih bisa di terima di propinsi atau di jakarta.

- Revisi Peta Kawasan Hutan harus disetujui, karena kita rapat hari ini supaya betul-betul mendapat masukan dari level Kabupaten sebelum kita juga diskusi di pontianak dan jakarta. Kita juga mengumpulkan data didalam proyek Colupsia dan semua data yang diperlukan untuk mendukung revisi yang didasarkan pada Data Ekologi, Biologi, Sosial Ekonomi dan Budaya.
- Kalau kita kembali ke fungsi hutan dan status lahan untuk proses pembuatan zonasi dan kita perlu informasi yang akurat dan terbaru tentang Penutupan Lahan (tipe-tipe vegetasi), Kesesuaian Lahan (didasarkan pada tanah dan kelerengan)
- Jadi seperti contoh Penutupan lahan dengan menggunakan pendekatan Multi - Sensor yang kita gunakan didalam proyek CoLUPSIA, untuk mengkasifikasi penutupan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu dan kita mengkaji penggunaan data radar untuk monitoring daerah penggenangan pada ekosistem lahan basah. Ini Contoh penggunaan data Radar untuk menentukan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu kita coba di daerah rawa dengan menggunakan citra satelit dan secara teknis kita bisa dengan menggunakan citra satelit kita bisa membuat peta yang cukup bagus untuk monitoring dari beberapa zonasi di hutan rawa di Kabupaten Kapuas Hulu.
- Peta di seluruh kabupaten yang menurut saya, peta yang cukup akurat dengan tipe - tipe huan di daerah, kita bisa melihat Hutan Sekunder, Lahan Pertanian dan bisa lihat beberapa tipe Hutan Rawa, selain itu kita bisa lihat tidak hanya satu tipe tapi ada dua atau tiga tipe hutan yang cukup beda dan beda juga dengan kedalaman gambutnya.
- Di seluruh kabupaten kita ada beberapa contoh petakan dengan menggunakan Skala 1:50.000. Bisa kita lihat beberapa tipe-tipe Hutan Rawa misalnya dari gambut yang tebal sampai ke gambut paling tebal, kita bisa lihat dimana mengambil kayu, dimana kebun - kebun masyarakat semua bisa di petakan jadi betul - betul satu alat yang bisa diskusikan di lapangan terutama dengan instasi-instansi terkait.

Fasilitator Valentinus Heri. SH

- Cukup jelas penjelasan dari pak Yves, saya memberikan kesimpulan bahwa peta sekarang yang di digunakan di Kapuas Hulu adalah peta skala 1:250.000 dan bisa dilihat dengan skala yang lebih detail yang di tawarkan oleh proyek CoLUPSIA adalah peta dengan Skala 1:50.000 bisa mengetahui misalnya : dimana batas-batas lahan atau kawasan hutan mungkin bisa menggunakan batas-batas alam, itu sering terjadi masalah di masyarakat yang berkaitan dengan batas-batas

lahan atau suatau kawasan, sebenarnya hal-hal tersebut bisa kita hindari kalau kita menggunakan peta dengan skala yang lebih detail.

- Sebetulnya proyek ini menawarkan satu Pilot Proyek di Kabupaten Kapuas Hulu dan juga di Seram supaya itu bisa di gunakan oleh kawan – kawan di Kabupaten Kapuas Hulu supaya menjadi modal kedepan kita langsung ke pusat, diseluruh Indonesia mungkin tidak ada peta yang tidak akurat untuk perencanaan penggunaan tata guna lahan ke depan.

SESSI TANYA JAWAB (Fasilitasi Oleh :Pak Bayu Shantiko)

Pertanyaan Pak Makmur. AS (Kepala Kantor BPN Kapuas hulu)

- Mengenai hasil metode PPA (*Participatory Prospective Analysis*) apa yang bapak sampaikan tadi dan beberapa hal yang mau saya sampaikan, mengenai BKPRD kami sudah pernah mendengar bahwa kami sudah pernah melakukan beberapa pertemuan, saya baru menerima surat bupati pada bulan Mei dan harapan saya kalau bisa BKPRD itu bisa melakukan pertemuan sekali dalam 2 minggu atau teknis satu kali satu bulan, baik pertemuan antar sektor. Memang selalu kami tekankan kepada bapak – bapak Kepala Dinas, Sekretariat di Bappeda. Mengenai informasi tadi ada koreksi sedikit, bahwa desa di dalam kawasan lebih dari 100 desa, mungkin kehutanan lebih tahu tentang jumlah desa yang berada di dalam kawasan hutan
- Dalam memberikan legalitas tanah dalam kawasan tersebut menjadi sangat terhambat, kami mendengar informasi bahwa penetapan kawasan ini masih dalam kawasan hutan seperti yang di sampaikan tadi bahwa peta-peta yang digunakan masih dalam skala kecil, kalau Skala 1:250.000 terlalu kecil sekali, skala 1:50.000 saya kira juga masih kecil, akan tetapi kalau kami di Badan Pertanahan Nasional sudah menggunakan Skala 1:10.000, Skala 1:5000 sampai Skala 1:1000, yang menjadi persoalan sekarang ini skalanya terlalu kecil dan saya juga mendengar bahwa BAKOSURTANAL berubah nama menjadi Badan Informasi Geospasial, mereka juga sudah menyediakan Peta-peta dengan skala besar, mulai dari Skala 1:10.000 bahkan skala pada 1:5000 juga ada.
- Kalau saran saya juga mungkin dalam rekomendasi pemakaian penetapan koordinat – koordinat pakai GPS navigasi kalau boleh memakai GPS geometik supaya hasilnya lebih mantap, kalau di BPN sudah di larang memakai GPS navigasi sedangkan GPS geometik yang akurasiya lebih baik, terutama untuk skala-skala pengajuan untuk daerah perkebunan dan dalam penentuan titik koordinat lebih akurat.
- Lalu dari PPA terakhir ini menurut bapak skenario yang mana dari skenario 1,2,3, dan Skenario 4 berdasarkan analisis studi terhadap empat skenario ini untuk Kapuas Hulu mana yang cocok ? katakanlah skenario yang pertama yang lebih baik. Perlu juga di perjelas aspek-aspek apa yang mau di tanyakan atau

yang di maksud didalam proyek Colupsia ini seperti apa? dan yang terakhir kami mohon semua hasil-hasil dari pertemuan ini baik dalam perumusan itu bisa di manfaatkan dan kami di berikan informasi yang akurat.

Pertanyaan Pak Imam Bukhari (Kantor Lingkungan Hidup Kab. Kapuas Hulu)

- Sedikit pertanyaan didalam Aspek Sosial Ekonomi yang menyangkut masalah isu Jasa Lingkungan, yang di maksud Isu jasa lingkungan di dalam proyek CoLUPSIA itu seperti apa ? karena setahu kami kalau untuk Isu Jasa Lingkungan, dalam kerangka Lingkungan Hidup, ini akan mengarah kepada Pajak pada akhirnya.
- Aspek Sosial Ekonomi, kalau saya lihta syarat-syarat untuk menentukan Jasa Lingkungan masih terlalu global, Parameter-parameter misalnya dengan daya dukung lingkungan, Parameter daya tampung Lingkungan dan selain itu daya tampung lingkungan valuasi ekonominya tidak muncul di situ, yang saya mau tanyakan di dalam penelitian CoLUPSIA mengenai daya dukung Jasa Lingkungan seperti apa ?

Pertanyaan Ibu K.M Sri Subekti (Dinas Pertanian Kab. Kapuas Hulu)

- Saya tertarik dengan peta yang di lihatkan tadi, peta ini sangat penting bagi kami di Dinas Pertanian karena akhir-akhir ini kami giat melakukan kegiatan perluasan sawah, lokasi di Kecamatan dan masih sistematik, contohnya di daerah Hulu Gurung kami ada semacam opini atau rencana, perluasan lahan persawahan dimana pembiayaan dari TNI-AD dengan perluasan sawah sebesar 200 Ha, kemudian di kawasan hutan seKapuas Hulu tersebar seluas 300 hektar dan jadi semuanya seluas 500 hektar, kalau di sini ada peta lokasinya data Kecamatan atau Desa, ke depan akan memudahkan kami dalam membuat perencanaan kira-kira daerah mana saja yang bisa kami kembangkan untuk perluasan sawah, kalau ada datanya mohon kami di beri informasinya.

Pertanyaan Ibu Theresia Lissa (Kantor Nakertrasos Kab. Kapuas Hulu)

- Status lahan yang terdapat di pala gurung mengalami perubahan sehingga pala gurung termasuk wilayah HL dengan adanya perubahan ini jadi warga setempat terutama warga dalam pembuatan sertifikat, mengalami hambatan samapi sekarang ini menjadi dilema buat kami, karena adanya suatu pemetaan secara pribadi ini sulit,
- Kemudian sebagai informasi untuk bapak di tahun 2011 – 2014 ini Areal Transmigrasi yang menjadi suatu rencana sudah kami lakukan sosialisasi di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kalis yang mengikuti Desa Benuis, Desa Tanjung Kerja, Desa Palin, Desa Nanga Nyabau, Benua Tengah, kemudian Kecamatan Puring Kencana, yang sekarang ini pada tahun 2012-2013 adalah

Desa Keliling Semulung atau Kirin Nangka, sekarang ini baru tahap pembangunan 2 SP yang sampai sekarang masih kami kerjakan, jadi kami mohon solusinya. Bagaimana dengan adanya perubahan skala itu sehingga sertifikat menjadi permasalahan bisa terealisasi bagi masyarakat setempat, sehingga dalam pemetaan tadi daerah – daerah itu nampak. Terutama pemerintah setempat sehingga apa yang menjadi kegiatan dilingkungan itu tidak menjadi permasalahan kedepannya untuk lebih jelasnya teknisnya temen saya bisa menjelaskan.

Pertanyaan Pak Windarto (Kantor Nakertrasos Kab. Kapuas Hulu)

- Apa yang di sampaikan oleh sekretaris saya bahwa ada beberapa lokasi transmigrasi yang sudah di kembangkan di Kabupaten Kapuas Hulu ini terdapat kendala – kendala sertifikat lahan yang memang sampai saat ini belum diberikan, di mana sertifikat itu merupakan hal yang mutlak, sampai saat ini sudah teridentifikasi masuk kedalam kawasan hutan.
- Kemudian tenaga teknis yang terlatih menggunakan alat GPS dan sebagainya, kami tidak bisa mendeteksi lahan-lahan yang dipergunakan untuk membangun lahan transmigrasi tersebut, mudah-mudahan dengan adanya rencana CoLUPSIA ini kami sangat berharap sekali untuk mengadakan pelatihan menggunakan alat sehingga kami bisa mengetahui batas-batas lahan yang tidak di bolehkan, daerah transmigrasi hanya menggunakan APL dan di pergunakan semaksimal mungkin.
- Program transmigrasi merupakan program pilihan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah dan beberapa waktu ini kami melaksanakan sosialisasi pada masyarakat kecamatan, apakah mereka menerima atau tidak untuk daerah transmigrasi menggunakan lahan yang sangat luas.

Fasilitasi Oleh :Pak Bayu Shantiko

- ❖ Ada beberapa pertanyaan tentang mengenai skenario yang mana cocok untuk Kabupaten Kapuas Hulu itu sebenarnya berdasarkan hasil sosialisasi dikecamatan dan dikabupaten, masyarakat melihat skenario yang no satu yang mereka inginkan karena bagaimana pun intinya adalah satu gambaran visi bersama – sama terdapat Kabupaten Kapuas Hulu menginginkan bahwa skenario no satu itu ada komunikasi antara pemerintah dalam tata guna lahan. Ada penggunaan energi ramah lingkungan adalah satu cita-cita atau visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu, pertanyaan bagaimana kita harus mencapai sebuah skenario dan yang mana harus kita capai terlebih dahulu.
- ❖ Kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan jasa lingkungan CoLUPSIA seperti apa, yang pertama untuk tahapan yang saat ini kita tidak sampai pada tahapan implementasi jasa lingkungan, kita melakukan kajian apa yang cocok di Kabupaten Kapuas Hulu, kita coba diskusi dengan masyarakat apakah mereka selama ini pernah merasakan suatu atau berpengalaman mengelola dana, karena

masyarakat misalnya seperti REDD, karbon kalau misalnya melibatkan masyarakat, apakah suatu intitusi atau kelembagaan yang cukup bisa mengelola dana – dana itu tadi, itu yang kita coba mulai tahap awal ini, yang kedua karena kita tidak melakukan implementasi maka apa yang bisa kita hasilkan yang kita sebut tadi yang menurut bapak Iman Bohari masih belum terperinci.

- ❖ Mungkin dalam kesempatan ini tidak di tanyakan di sini, kemudian menjelaskan ada 10 tahapan agar bagaimana skema PES ini atau jasa lingkungan bisa di terapkan di Kabupaten Kapuas Hulu, arahnya sendiri seperti apa mungkin ini berkaitan dengan rekomendasi kita dengan PEMDA apa yang kita nantikan bisa di hasilkan di dalam skema PES ini, jadi kita memberikan panduan satu identifikasi satu intisiative PES atau tidak, kelembagaan misalnya kelembagaan di masyarakatnya, monitoring itu selama masuk dalam skema PES dan memang ini bukan skema yang cukup mudah terjadi di negeri, ini ada satu perhitungan evaluasi ekonomi apakah riskan atau tidak, kemudian di tindak lanjuti seperti evaluasi tersebut.

Jawaban/Tanggapan dari Pak Yves Laumonier

- ❖ Tentang skala 1: 50.000 memang kita maksimumkan karena kita cukup datanya, kita bisa sekaligus bicara tentang skala di desa atau di kota, untuk skala 1:5000 atau skala 1:10.000 itu memang untuk melibatkan kabupaten sementara untuk masalah kiri kanan petanya kita belum bisa sampai, mungkin ada beberapa data dari kehutanan tapi saya rasa sedikit sekali, mungkin mereka lagi mencari untuk memperbaiki untuk di beberapa kota, tapi di tempat jauh itu desa tentu kita perlu data yang akurat.
- ❖ Selain itu saya pikir tetap seluruh Indonesia ada tata guna lahan dengan menggunakan skala Peta 1:50.000 itu akan membantu dalam menentukan sebuah kawasan hutan bisa lebih jelas dan mengenai data – data kecamatan atau semua posisi desa oleh karena itu hari ini kita bisa duduk bersama untuk melihat beberapa - beberapa contoh misalnya program pertanian kalau mau sertifikat tipe-tipe kebun dengan skala 1:50.000 tetap masih kurang untuk membedakan antara mozaik – mozaik dari kebun itu satu masalah yang penting akan tetapi kita perlu nanti kalau kita setuju misalnya di mana kawasan hutan baru bisa kita kerjakan dengan skala lebih besar lagi yang kelihatan petanya dan untuk transmigrasi misalnya bisa sedikit lebih jelas untuk melihat di mana lokasi transmigrasi dalam kawasan hutan, sebetulnya dari awal itu tidak bisa terjadi kalau lokasi yang di cadangkan untuk transmigrasi berada di dalam kawasan hutan.
- ❖ Kalau sudah terjadi begini, justru bikin sebuah rekomendasi dari kita akan urus proposalnya untuk status kawasan di robah, karena kalau transmigrasi sudah di situ mungkin bisa keluar lagi kembali ke hutan jadi itu seperti tadi kita berbicara di beberapa desa dan kawasan hutan apakah benar dalam

kawasan, berarti dengan menggunakan Skala 1:250.000 ke bawah, secara legal tidak ada banyak kekuatan, untuk itu solusinya adalah Status kawasan hutan harus di berubah, kalau menurut kita kawasan hutan sesuai dengan kondisi hutan yang sehat dan yang masih ada hutannya, saya pikir itu bisa di rekomendasikan jadi itu merupakan kasus – kasus yang bisa di selidiki.

- ❖ Sering terjadi kalau ada konflik di suatu lahan itu ada beberapa contoh di sumatra karena mereka juga diskusi tentang batas dan di buat di jakarta dengan menggunakan skala 1:250.000 ternyata tidak ada gunanya juga, karena di lapangan tidak ada patok sama sekali secara legal hukum tidak ada, kita tidak usah diskusi tentang itu mungkin untuk kita lihat sampai nanti di mana lokasi – lokasi yang akan menjadi lokasi transmigrasi masih ada kesempatan untuk bisa secara teknis.

Fasilitasi Oleh :Pak Bayu Shantiko

Mendiskusikan beberapa hal kita coba diskusikan di sini satu pertanyaan bapak juga apakah misalnya skenario menggambarkan masa depan Kapuas hulu, di akhir acara ini sebenarnya kita mencoba membuat rumusan yang di inginkan beberapa pihak bagaimana di akhir acara ini kita bisa menghasilkan satu harapannya bisa menjadi satu rekomendasi kepada pemda atau pun misalnya kita membawa hasil ini ke tingkat propinsi maupun ke tingkat pusat ada rekomendasi yang menjadi dasar untuk itu kira – kira dari tanggapan dari bapak dan ibu sekalian di forum ini apakah memang skenario ini memang skenario menggambarkan masa depan Kapuas Hulu 30 tahun yang akan datang apakah ini bisa menggambarkan visi masa depan Kabupaten Kapuas hulu.

Pertanyaan Pak Mardiansyah (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu)

- Apa yang di paparkan sebelumnya kalau bisa skenario kedepan artinya apa yang di tampilkan untuk skenario pertama ini memang skenario yang sangat ideal tetapi perlu juga ada catatan – catatan dari skenario ini apa benar – benar menjadi kesepakatan semua pihak yang ke depannya terkait penataan tata ruang itu benar – benar satu gerak, satu langkah jangan setelah ini di sepakati juga dari atas harus di laksanakan, apa yang kita bahas hari ini akan menata kembali memang kalau bisa tapi memang ang artinya skenario pertama inilah yang memang sangat ideal.

Fasilitasi Oleh :Pak Bayu Shantiko

Memang ini pertanyaan kita semua, apakah memang ini bisa menjadi kesepakatan kita semua kalau misalnya kita memang lagi tetapi apakah ini bisa menjadi kita bisa bersama – sama ke tingkat yang lebih tinggi dan dan juga bisa menyakinkan pimpinan ke tempat yang tinggi bahwa ini adalah satu hal yang di

sepakati bersama dan ini harus kita laksanakan bersama – sama yang saya kira menjadi kunci bagaimana kita bisa menyakinkan memang seperti apa yang bapak sampaikan dari atas sudah melakukan dan memutuskan itu sudah cerita lain lagi tapi bagaimana sekarang ini bisa juga menyampaikan dan informasi masing – masing intansi yang bersangkutan. Saya sedikit mengulang tadi berkaitan dengan masalah – masalah yang berkaitan dengan tata guna lahan tadi kita mulai dengan status kawasan hutan di kapuas hulu yang dari SK 529 kemudian juga beberapa persoalan yang kita lihat bersama juga mengalami masalah perbedaan skala.

Pertanyaan Pak Makmur. AS (Kepala Kantor BPN Kapuas Hulu)

- ❖ Sebelum melangkah mengenai skenario mumpung saya masih ingat skenario satu ini saya tidak tahu apa fungsinya selain saya ada beberapa saran lagi bagaimana rencana pembangunan selama ini di rasakan oleh masyarakat di daerah dengan utara dan selatan yang mungkin perlu ada perhatian yang serius, padahal kesempatan berusaha terbuka lebar, karena secara pendekatan struktural.
- ❖ Kemudian pendekatan ekonomi kerakyatan banyak lalu pertanyaan ekonomi kerakyatan ini saya sengaja mendengar tadi kira-kira dari studi ini di kapuas hulu ini dalam rangka meningkatkan Swadaya pangan misalnya komoditi apa sih yang paling cocok di tanam di kapuas hulu. Kami ini mau menanam apa yang paling cocok, karet kah, sawit kah atau padi, perlu juga di konfirmasikan kepada kawan di sini juga, memang ekonomi kerakyatan ini bisa lebih baik tetapi tidak mengganggu kondisi lingkungan tidak ada deporestasi yang masih dalam skala besar tapi kalau tidak ada saran – saran atau rekomendasi dari CoLUPSIA tidak ada orang yang mau memberikan informasi yang lebih baik, apa rekomendasi atau saran-saran untuk meningkatkan ekonomi rakyat.
- ❖ Kemudian di paragraf yang ke empat ada juga di kapuas hulu ini salah satu isu yang saya alami bahwa legalitas formal adat ini belum terakomodasikan dengan baik, hanya masih dalam ingatan – ingatan secara lisan, menurut adat kami, belum tertuang kedalam sebuah aturan yang tertulis seperti contoh di Sumatra Barat, di sini ada ketemengungan ini menjadi kesulitan juga saran saya di perdalam hak adat didalam kawasan hutan atau pun dalam kawasan – kawasan tertentu.
- ❖ Keterkaitan masalah mau mempergunakan GPS itu saya secara teknis memang daerah-daerah tertentu di kawasan perdesaan itu memang supaya tidak terjadi konflik, terjadi permasalahan memang secara umum GPS navigasi tetapi daerah – daerah dan peralatannya juga lebih baik, karena sering kali antara jarak beberapa meter itu jadi permasalahan.

Fasilitasi Oleh :Pak Bayu Shantiko

Terimakasih Pak kalau bicara masalah kolaborasi di skenario sudah di coba kita sampaikan didalam laporan yang ada pada bapak – bapak sekalian, memang mengenai tambahan bapak untuk berkaitan dengan isi pemetaan saya kira itu masukan yang baik, kita jelaskan dalam skenarionya bisa lebih mengantarkan ke situasi kedepan.

Kemudian mengenai skenario mana yang cocok di pilih itu juga pertanyaan yang cukup rumit juga karena yang berkaitan dengan kondisi masyarakat di sini seperti apa ?, selama ini budidaya tanaman seperti apa yang cocok di kapuas hulu dan kita tidak bisa mengenalkan satu-satu produk baru ke kapuas hulu tanpa memberikan sesuatu ke pastian peningkatan kapasitas jadi itu adalah faktor – faktor yang di pertimbangkan apakah itu karet, sayur atau padi, saya kira semuanya punya plus – minus kita lihat terlebih dahulu mana yang kesiapan di lapangan, selain itu kita akan coba tambahan – tambahan dan sambil jalan kita mendiskusikannya, tapi kita coba kembali sedikit ke permasalahan yang tadi sudah bapak – bapak sampaikan, mulai dari skala yang tidak tepat atau tidak cukup detil, kemudian mengenai desa yang berada dalam kawasan hutan lindung dan lokasi yang tidak sesuai dengan topografi, status hukum yang tidak jelas, batas yang tidak jelas.

Kemudian juga seperti yang kita lihat di sini bagaimana alokasi keuangan itu masih tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan maka apakah hal – hal seperti ini atau masalah – masalah sudah kita hadapi ini bisa membuat tata guna lahan itu efektif, kita semua menginginkan ada suatu tata guna lahan yang efektif, tetapi yang masih terjadi adalah belum ada kepastian status lahan, kemudian masih ada kejelasan batas dan itu juga kawasan hutan dan apakah kemudian kita bisa melakukan, tata guna lahan yang efektif kalau misalnya belum ada tata guna lahan dan kepastian kejelasan batas – batas lahan tadi dan apakah bisa efektif jika tata guna lahan dan kepastian kejelasan batas – batas lahan masih belum tuntas.

Pertanyaan Ibu K.M Sri Subekti (Dinas Pertanian Kab. Kapuas Hulu)

Berkenaan dengan pertanyaan apakah tata guna lahan bisa efektif tanpa adanya kepastian dan kejelasan status lahan, ditahun 2012 kami dari Dinas Pertanian mendapat kesempatan untuk melakukan sertifikasi lahan pertanian dari beberapa kelompok tani sebanyak 100 porsi dan kami usulkan ke BPN akan tetapi lokasi di usulkan masuk dalam kawasan hutan produksi, jadi tidak satupun dari usulan itu yang lolos, sedangkan lokasinya berada di daerah Mantan hulu dan berkaitan dengan pertanyaan ini apakah tata guna lahan bisa efektif tanpa ada kepastian atau kejelasan status lahan jawabannya tidak efektif, mungkin cuma itu yang bisa kami sampaikan

Pertanyaan Pak Makmur. AS (Kepala Kantor BPN Kapuas hulu)

Menanggapi apakah tata guna lahan bisa efektif tanpa kepastian lahan kawasan hutan dan sebagainya memang tidak efektif, karena sebelum ini dan saat – saat ini banyak masyarakat kita yang tidak tahu batas kawasan hutan, yang mana kawasan hutan Produksi, Hutan Lindung banyak masyarakat yang tidak tahu batasnya sejauh mana, sehingga kampung mereka masuk dalam kawasan.

Kemudian dikaitkan dengan permasalahan di mana syarat utama kami untuk melakukan sertifikasi harus ada salah satunya ada penyerahan dari masyarakat kemudian, celar artinya tidak masuk dalam status kawasan hutan, kemudian ada memakai layak bangunan ini di mana saat kita mengawali perencanaan tempat transmigrasi mendantangi instansi - instansi dan survei lokasi dimana instansi ini merekomendasikan, dimana instansi – instansi terkait akan memberi rekomendasi bahwa lokasi – lokasi tersebut tidak masuk dalam kawasan hutan, maupun tidak mengambil tambang dan sebagainya dalam lingkungan hidup, kemudian juga bisa di tampilkan, namun memang kadang – kadang telah sesuai dari dinas instansi terkait, justru masyarakat yang tidak konsisten sehingga sudah di petakan menjadi lokasi transmigrasi, lahan yang semula sudah diserahkan menjadi lahan transmigrasi dari masyarakat menjadi strategi lahan, sehingga itulah akibatnya daerah transmigrasi itu termasuk dalam kawasan yang tidak diperbolehkan artinya bergeser dari tata ruang yang sudah kita buat, karena masyarakat yang tidak konsisten dengan kesepakatan , apakah ini sesuai dengan tata ruang lahan tanpa kepastian status lahan, jadi memang suatu lahan harus memiliki tanda-tanda batas.

Fasilitasi Oleh :Pak Bayu Shantiko

Secara umum bahwa ada jawaban ini tidak efektif, kalau sudah tidak efektif bagaimana apa yang bisa di lakukan, apakah kemudian kita tidak efektif kira – kira apa yang bisa di lakukan, maksudnya sebagai SKPD yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu, apa yang bisa di lakukan, misalnya apakah kalau ada jalan lain siapa yang perlu di libatkan atau misalnya apakah harus mengajak pihak – pihak lain apakah itu diperlukan atau bisa dilakukan sendiri oleh PEMDA, namun mengingat ternyata bagaimana hal ini bisa efektif, sebagai mana cara kita ada saran dari Dinas Transmigrasi misalnya dari satu contoh solusi untuk Dinas Transmigrasi harus ada standar yang pas itu adalah salah satu contoh dan apa solusi – solusi yang lain.

Pertanyaan Pak Makmur. AS (Kepala Kantor BPN Kapuas Hulu)

Jadi solusinya adalah yang pertama efektif atau tidak, solusinya seperti apa intinya kerja sama dan berbagai informasi, tapi secara mekanisme perencanaan dan permohonan kegiatan kedinasan saran saya adalah permohonan melalui BKPRD.

BKPRD inilah yang bisa meloloskan dan memutuskan Kepada Bapak Bupati dalam rangka penetapan – penetapan lokasi contohnya pertanian, katakanlah untuk pembukaan sawah secara masal, untuk membuka lahan sawah baru kalau tiba – tiba yang kita minta secara kasat mata saja misalnya lokasi yang di hulu gurung hanya sawah, banyak orang koordinasi ini yang saya juga berladang saya tidak tahu dimana batas kawasan dan Informasi dari BPN dan BPN membantu untuk pengembangan usaha – usaha program kedinasan masih di wilayah APL, kalau berbicara kawasan kami angkat tangan itu bukan ranah kami. Nah inilah yang perlu kesepakatan jadi BKPRD ini perlu diperkuat, lembaga atau institusi misalnya tidak ada disana dan tidak diperkuat repot juga dalam memutuskan rencana.

Oleh karena itu kita tetap perlu koordinasi dengan setiap sektor katakanlah dengan BPKH karena merekalah yang mempunyai batas – batas kewenangan yang menetapkan batas kawasan hutan, untuk melakukan di mana batas – batas, walau pun sudah ada kebijakan pemerintah kalau tidak salah ada beberapa kementerian kita sudah di perintahkan untuk mengidentifikasi dimana desa yang masuk dalam kawasan hutan, sehingga bisa kita usulkan untuk di dikeluarkan dari kawasan hutan paling tidak kalau sudah dikeluarkan dari kawasan hutan minimal 100 desa ini tidak menjadi orang hutan lagi, soalnya ada 100 desa terletak di kawasan hutan semua inilah yang menjadi satu – satunya keterhambatan - keterhambatan di Indonesia.

Saya pikir koordinasi adalah koordinasi lintas sektor ada BPKH, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Pertanian, Instansi pemerintah dan lain – lain, jadi kami juga tiba – tiba di kasi data ini pak Surat Keterangan Tanah (SKT) dari kepala desa, saya hanya mengingatkan kepala desa, Pak kalau SKT jangan asal terbit nanti berada didalam kawasan hutan, inikan bingung, nanti bagaimana legalitasnya, untuk yang lain ada undang – undang nya dari Kehutanan oleh karena itu kita duduk

bersama – sama Bappeda, Bapak Bupati, ada satu sekretariat tetap yaitu di BKPRD ini lembaganya sudah di bentuk, jadi sebenarnya ketua Bappeda harus menjelaskan bahwa kita punya sekretariat yang mana kita bisa saling berbagi informasi yang ada, sehingga pembangunan kita jalan, pada koridor-koridor yang sudah di tetapkan. saya kira demikian terimakasih.

Pertanyaan Pak Mardiansyah (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas Hulu)

Sekedar melengkapi terkait permasalahan batas memang selain koordinasi permasalahan – permasalahan sosial terkait hutan memang sebaiknya kita sama – sama mendorong agar kewenangan pemetaan batas dan tata batas kawasan hutan itu di bebaskan ke kabupaten, sehingga di level tapak kita bersentuhan langsung dengan kondisi lapangan, kalau itu tidak bisa kita dorong. Yang paling kita sikapi kawasan hutan bukan APL terkait penataan batas dan tata batas untuk kawasan

APL yang bila benar – benar efektif kita lakukan akan membutuhkan dana yang cukup besar sehingga tindakanya pemerintah daerah kita mengharapkan peran serta pihak terutama masyarakat dan itu benar – benar aktif melaksanakan batas kawasan hutan seperti yang di APL sehingga kedepannya kalau ada pemanfaatan atau katakanlah lokasi – lokasi di sekitar areal di luar kawasan hutan tidak ada lagi masyarakat mengklaim bahwa itu lahan saya, ada lahan tidur seharusnya sudah clear di masyarakat saya pikir itu yang dalam waktu sekarang yang paling bisa kita laksanakan sambil kita mendorong bagaimana tata batas itu tidak di BPKH, minimal ini bisa turun ke kabupaten sehingga tidak terlalu jauh untuk kita berurusan, saya pikir cuma itu terima kasih.

Fasilitasi Oleh :Pak Bayu Shantiko

Sehingga ada usulan bahwa perlu adanya tata batas yang pertama, kemudian kalau misalnya tidak bisa di kawasan hutan intinya kita rapat tata batas di kawasan di APL ini mungkin bisa terjadi tapi kita masih punya masalah bahwa skala 1:250.000 terus kita cobakan di skala 1:50.000 ternyata ada persoalan, bagaimana kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini tadi disampaikan tidak efektif juga dan bingung menyelesaikan tata batas khususnya yang berkaitan apakah ini sesuai kondisi di lapangan. Pertanyaan bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi itu ?

Pertanyaan Pak Makmur. AS (Kepala Kantor BPN Kapuas Hulu)

Untuk menjawab bagaimana cara mengatasi ini memang banyak terjadi masyarakat diperdesaan dimana penduduk perdesaan banyak yang tidak mengetahui status kawasan dan ini tidak sedikit yang di desa, saya menyarankan untuk setiap desa di berikan peta, peta yang memuat atau yang mudah di pahami oleh masyarakat mana yang kawasan hutan dan mana yang bukan kawasan hutan, karena tidak semua desa mempunyai peta, kalau ada peta secara umum membuat Wilayah Kabupaten maupun Provinsi itu yang dikaitkan dengan masyarakat, kemudian mudah-mudahan dengan pemberian peta ke semua desa masyarakat tidak selalu ke kabupaten cukup ke kantor desa dan ada staf desa yang menunjukkan peta kepada masyarakat desa ini kawasan hutan dan ini bukan kawasan hutan.

Pertanyaan Pak Aspriansyah dari (Dinas Pertambangan Kab. Kapuas Hulu)

- ❖ Pertama PEMDA atau BKPRD menginfentarisasikan secara detail daerah-daerah mana yang tumpang tindih dan daerah-daerah mana yang masuk ke dalam kawasan hutan lindung, untuk di petakan dan mungkin BPKH juga memberi patok-patok batas kawasan itu harus secepatnya dilakukan.

- ❖ Kedua mungkin dilakukan pemetaan ulang karena peta yang ada itu seperti yang bapak sampaikan tidak akurat, karena sekalanya lebih kecil, sehingga mungkin bisa dilakukan dengan skala yang lebih besar seperti dengan skala 1:50.000, sehingga Pemda itu membuat regulasi hukum yang lebih jelas dan supaya itu diusulkan agar ada perubahan status lahan didalam rencana tata ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

Fasilitasi Oleh :Pak Bayu Shantiko

Terima kasih kalau kita lihat pembahasan atau diskusi kita sudah sedikit mulai mengerucut, ada masukan bagaimana kita melakukan infentarisasi desa – desa yang masuk ke dalam kawasan hutan lindung, kemudian lebih besar lagi kita melakukan penataan ruang kemudian ada dekorasi hukum dan yang terakhir ada perubahan status lahan.

Yang berkaitan dengan pemetaan ulang ini mungkin satu bagian yang sebenarnya kita coba bantu suatu analisis spasial dengan menggunakan skala- skala yang tepat dan informasi yang lebih detil, sehingga kita menghasilkan beberapa peta yang bisa kita lihat di sini, kemudian kita masih punya persoalan perubahan status lahan, tadi apa yang disampaikan Bapak Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Kehutanan mungkin kita masih tergantung di provinsi atau Peta usulan status lahan masih tergantung diKementerian Kehutanan.

Pertanyaan Pak Makmur. AS (Kepala Kantor BPN Kapuas Hulu)

Kalau kita memang mau niat dengan baik, dengan tulus pada dasarnya ada dua, yang kawasan hutan dan yang bukan kawasan hutan terutama yang Hutan Lindung yang kita perhatikan sekarang, terutama kita melihat dari sisi identifikasinya, di mana terutama daerah – daerah yang di desa atau kawasan yang telah kita usahakan. Mari kita usulkan seperti kata Bapak Kepala Bappeda tadi, karena setahu saya dulu saya sering mengikuti masalah penetapan kawasan Hutan Lindung, ini pada dasarnya memang selalu di sampaikan, tapi kejadiannya tidak demikian karena kasus seperti kasus pembangunan PLN yang mau di pakai Batu Bara, karena yang status lahan saja tidak betul, sebetulnya kalau itu bisa berdiri di Kabupaten Kapuas Hulu ini, saya pikir untuk ke mana – mana tidak cukup.

Kita usulkan dengan peraturan tentu, ada regulasi hukum terutama kalau itu memang ke putusan dari menteri dan revisinya dari keputusan menteri, dan kita doakan akan tercapai dan bisa kita gunakan, selain itu saya pikir baru kita menata dengan baik dan menetapkan itu karena sudah ada dasar hukumnya dan semuanya harus kita susunkan di masyarakat, sehingga masyarakat akan mengerti, peta bisa tahu, tata batasnya juga tau, kemudian kalau semua sudah tidak ada masalah, solusinya itu pasti akan berjalan dengan baik, tapi karena selama ini masyarakat bukan tidak tahu, mana kawasan yang boleh di usahakan

dan mana yang tidak boleh, kita kan tahu semua masyarakat kita membakar lahan sedangkan mereka tidak tahu itu kawasan lindung ataupun kawasan yang lain, sehingga nanti kalau ada kepala desanya mengeluarkan Surat Keterangan Tanah mau sertifikatkan, seperti apa yang di katakan oleh bapak kepala BPN tadi, karena ini kawasan hutan bukan haknya bapak kepala BPN, karena semua kawasan yang mengeluarkan Kementri Kehutanan, menurut saya demikian urutannya, itu kalau memang harus mempunyai niat yang baik, baru kita usulkan penataan ulang memang mungkin RTRW lebih bagus sampai ke desa – desanya harus ada. Kalau sudah jelas kita sosialisasikan dengan masyarakat, sekian dan terimakasih.

Fasilitasi Oleh :Pak Bayu Shantiko

Artinya tadi sudah ada satu-satu yang bisa kita susun bersama, tapi pertanyaanya kembali ke apakah misalnya dari hasil-hasil peta skala yang lebih kecil dengan informasi yang lebih rinci, apakah petanya menjadi dasar untuk bapak-bapak sekalian untuk bisa maju ke tingkat yang lebih tinggi, sampai ke usul perubahan.

Pertanyaan Pak Makmur. AS (Kepala Kantor BPN Kapuas Hulu)

Saya pikir pada dasarnya adalah aturan di Indonesia kalau ada kesalahan sesuatu pasti bisa berubah, maka satu kebijakan itu bisa berubah, saya pikir demikian pak.

Fasilitasi Oleh :Pak Bayu Shantiko

Mungkin nanti kawan kami coba merampungkan narasinya, mungkin yang terakhir udah bisa sedikit terjawab peran apa yang bisa dilakukan oleh instansi bapak – bapak sekalian, mungkin kalau sedikit sedikit dapat di simpulkan ada kerja sama antar sektor, kemudian ada organisasi fungsi BKPRD, pada intinya ada masukan Pak Dedy, optimalisasi fungsi dari BKPRD jadi sedikit saya menyimpulkan disini, kemudian peran lain mencoba mengajak BPKH yang berkaitan dengan pemetaan pada kawasan hutan dan juga identifikasikan atau menginfentarisasi secara rinci dimana yang memang masuk di dalam kawasan hutan, kemudian bagai mana caranya untuk memastikan bahwa desa – desa itu tetap bisa mendapatkan akses ekonominya, kalau pun mereka bekerja di dalam kawasan hutan. Mungkin sebagian itu yang saya coba catat, mungkin ada tambahan peran-peran yang bisa dilakukan oleh masing - masing instansi untuk mendorong proses-proses tadi.

Pertanyaan Pak Makmur. AS (Kepala Kantor BPN Kapuas Hulu)

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) ini juga harus secara aktif berkomunikasi dengan mereka yang ada di provinsi, karena bagaimana pun anggota-anggotanya berbagai konstitusi jadi memang proaktif, BKPRD kabupaten, terus BKPRD Provinsi dan BKPRN (Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional) kalau memang ada politik yang kuat untuk menyelesaikan ini secara sungguh-sungguh dengan serius dan dari DPRD, kalau misalnya kita disini hanya nanti terlalu skopnya kecil antara BPKH ditingkat level kabupaten saja, tidak bisa melibatkan diatas juga agak sia - sia rasanya. Ada lagi satu catatan kecil dari kami mengenai perubahan status lahan perlu ini perlu dicermati juga dari Dinas Pertanian, seringkali orang itu sawahnya berubah menjadi perkampungan, seringkali 20 meter, 1 Hektar menanam padi atau menanam karet, menjadi pekarangan atau rumah, khususnya itu menjadi kolam siluk, atau menjadi pemanfaatan lain.

Kami juga ada pelayanan perubahan penggunaan tanah, nanti kami akan laporkan ke Bappeda dan Dinas Pertanian juga ada beberapa lahan - lahan pertanian menjadi rumah, kami tidak bisa mengontrol dan melarang masyarakat, karena memang perlu melakukan penata lahan pertanian, yang tidak bisa berubah hanya menginformasikan lahan - lahan di kawasan APL, akan tetapi di kawasan hutan, kami angkat tangan, saya kira itu terima kasih.

Fasilitasi Oleh :Pak Bayu Shantiko

Baik terimakasih, sebenarnya juga kami akan menginformasikan bahwa kami akan melakukan pertemuan para pihak ditingkat nasional, rencananya mungkin kita akan mengundang beberapa stakeholder seperti dari BAPENAS, kemudian dari Kementerian Kehutanan, kemudian beberapa pihak - pihak yang mungkin terkait dengan revisi tata ruang atau revisi tata guna lahan, rencananya kita akan mendiskusikan mengenai beberapa hasil-hasil temuan kita di Kabupaten Kapuas Hulu, mungkin saya kira ini mohon menyampaikan juga misalnya dari pihak kabupaten juga bisa menghadiri acara ini, mungkin kita juga bisa memberi masukan misalnya kalau itu memang berkaitan dengan instansi yang sebaiknya dilibatkan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, untuk mendapatkan masukan dari instansi yang lain.

RUMUSAN KESIMPULAN (draft)

Pada Hari Selasa, tanggal 17 September 2013 di Aula Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu telah dilaksanakan pertemuan antara SKPD (terlampir) dan Proyek CoLUPSIA tentang diseminasi hasil kegiatan CoLUPSIA dan diskusi penggunaan hasil kegiatan dalam penatagunaan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu. Pertemuan tersebut menyimpulkan:

1. Masa depan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan tanggung jawab bersama pemangku kepentingan di Kabupaten Kapuas Hulu. Para pihak sepakat “skenario langkah serampak” merupakan skenario yang diinginkan dan untuk mewujudkan “skenario langkah serampak”, para pihak mendorong pemerintah daerah melaksanakan pembangunan dan memutuskan tata guna lahan hutan dan non hutan yang adil.
2. Kepastian dan kejelasan status lahan merupakan syarat tata guna lahan yang efektif. Untuk memastikan dan memperjelas status lahan hutan dan non hutan, para pihak sepakat untuk mengusulkan langkah - langkah mengatasi masalah batas dan ketidak pastian kawasan hutan dan non hutan yaitu:
 - a. Inventarisasi masalah batas
 - b. Pemetaan ulang dan usulan perubahan status lahan
 - c. Penandaan batas yang pasti di lapangan
 - d. Regulasi yang mengikat
 - e. Sosialisasi, implementasi peraturan dan monitoring
3. Penyelesaian tata batas kawasan hutan tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah sendirian, perlu kerjasama dan koordinasi Pemerintah dan *stakeholders* diantaranya mengoptimalkan fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten dan membangun koordinasi dengan BKPRD propinsi dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen mendorong proses - proses ke arah penyelesaian tata guna lahan yang lebih baik.